



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN

T.A. 2025



dayamas_bnn

infobnn_ri





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.

LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan BNN yaitu Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional.

Dalam laporan ini, kami sajikan hasil capaian kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan masyarakat BNN selama tahun 2025, yang meliputi: Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Profil Kedeputian, capaian Kinerja Program dan Anggaran, Analisis dan Evaluasi serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan masyarakat luas, serta dapat menjadi acuan bagi BNN dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di masa depan.

Terima kasih.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

#Ajak-ajak masyarakat produktif dan mandiri

#Salam sehat tanpa narkoba

Jakarta, Januari 2026

Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN



Drs. Yuki Ruchimat, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. GAMBARAN UMUM	7
B. DASAR HUKUM	8
C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	9
1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
2. Struktur Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA	11
1. Tujuan	11
2. Perencanaan Strategis	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2025)	13
C. PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA JANGKA MENENGAH NASIONAL DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TAHUN 2021-2025)	16
1. Capaian Kinerja Tahun 2025	16
2. Capaian Kinerja Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2025	18
3. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2025	19
B. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUNAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF	20
1. Capaian Kinerja Kegiatan	20
2. Capaian Kinerja Rincian Output	21
a. Capaian Rincian Output QDD.002	22
b. Capaian Rincian Output QDD.001	35
c. Capaian Rincian Output AFA	39
C. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2025	40
1. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir (2021–2025)	40
2. Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)	42
D. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUNAN DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT	43
1. Capaian Kinerja Kegiatan	43
2. Capaian Kinerja Rincian Output	44
E. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2025	44
1. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir (2021–2025)	44
2. Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)	45
F. KINERJA ANGGARAN	47

BAB IV PENUTUP	50
A. SIMPULAN	50
B. REKOMENDASI	51
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	i
HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA TAHUN 2025	ii
HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2025	iii
HASIL PENGUKURAN IKRN DI WILAYAH PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2025	iv
PERUBAHAN KAWASAN RAWAN NARKOBA	v

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sebagai unit kerja di BNN RI, Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga menyusun LAKIP 2025.

Pada Tahun 2025, capaian sasaran tersebut ditunjukkan melalui jumlah Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebanyak 169 kabupaten/kota atau 99,41% dari target 170 kabupaten/kota vertikal BNN. Dari total capaian tersebut, sebanyak 86 kabupaten/kota (50,59%) berada pada kategori Sangat Tanggap dengan nilai indeks 3,25–3,91 (skala 4), sedangkan 83 kabupaten/kota (48,81%) berada pada kategori Tanggap dengan nilai indeks 2,65–3,24 (skala 4).

Secara nasional, Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) mencapai nilai 3,23 (skala 4) atau setara dengan 80,75 (skala 100), yang termasuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai Indeks KOTAN Nasional Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,12 atau menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan ketanggapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkoba.

Pada Kinerja Kegiatan di Direktorat Peran Serta masyarakat di Tahun 2025, sasaran dari Penguatan sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas masyarakat, dicapai melalui advokasi kebijakan KOTAN sejumlah 264 lembaga (100%) yang tersebar pada lingkungan pendidikan 127 lembaga (48.1%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.70, lingkungan pemerintah 87 lembaga (32.9%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.69, lingkungan masyarakat 94 lembaga (35.6%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.67, dan lingkungan swasta 18 lembaga (6.8%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3,71 yang secara kumulatif diperoleh IKP Nasional 3.66 dalam kategori A I(sangat mandiri) tentunya tidak lepas dari partisipasi kemandirian Penggiat P4GN yang ada di tiap-tiap lingkungan.

Pada capaian kinerja Kerja di Direktorat Pemberdayaan Alternatif di Tahun 2025 menetapkan target pembinaan sebanyak 90 kawasan. Berdasarkan hasil capaian kinerja, realisasi kawasan yang berhasil dibina dan dinyatakan pulih mencapai 87 kawasan. Selain itu, capaian Fasilitas Program Alternative Development menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Fasilitas Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang terealisasi sebanyak 11 kelompok masyarakat atau 122,22% dari target 9 kelompok masyarakat. Sementara itu, fasilitas Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika terealisasi sebanyak 90 kelompok masyarakat atau 111,11% dari target 81 kelompok masyarakat.

Untuk Target Kinerja Anggaran, Realisasi anggaran Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dicapai sebesar 78,34% dimana dari pagu awal sebesar Rp 52.093.247.000 mencapai Rp 40.810.239.191. Berkaitan dengan kebijakan pemblokiran anggaran TA 2025, dengan pendekatan *automatic adjustment* yang dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden, maka hal itu berdampak terjadinya pengurangan pagu anggaran Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 11.007.826.000. Menyikapi kebijakan tersebut, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif.

Selanjutnya pada masa pasca pemblokiran, Capaian kinerja anggaran dicapai sebesar 99,33% dimana dari pagu anggaran sebesar Rp 41.085.421.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 40.810.239.191. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada kedua kegiatan utama menunjukkan efektivitas penganggaran berbasis kinerja, kualitas perencanaan yang baik, serta kemampuan satuan kerja dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tanpa mengurangi kinerja *output*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja bagi setiap unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya menanggulangi bahaya narkoba adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya seluruh komponen bangsa agar secara mandiri dan berkelanjutan melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan P4GN serta menjadi garda terdepan dalam mendorong peran serta aktif masyarakat.

Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN sebagai pengemban amanah pemberdayaan masyarakat anti narkoba memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat yang berfokus pada penguatan ketahanan lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba, serta Direktorat Pemberdayaan Alternatif yang melakukan intervensi P4GN pada kawasan rawan dan rentan narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama Tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan tugas menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa dalam upaya P4GN, disajikan dalam bentuk hasil monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

- **Fungsi**

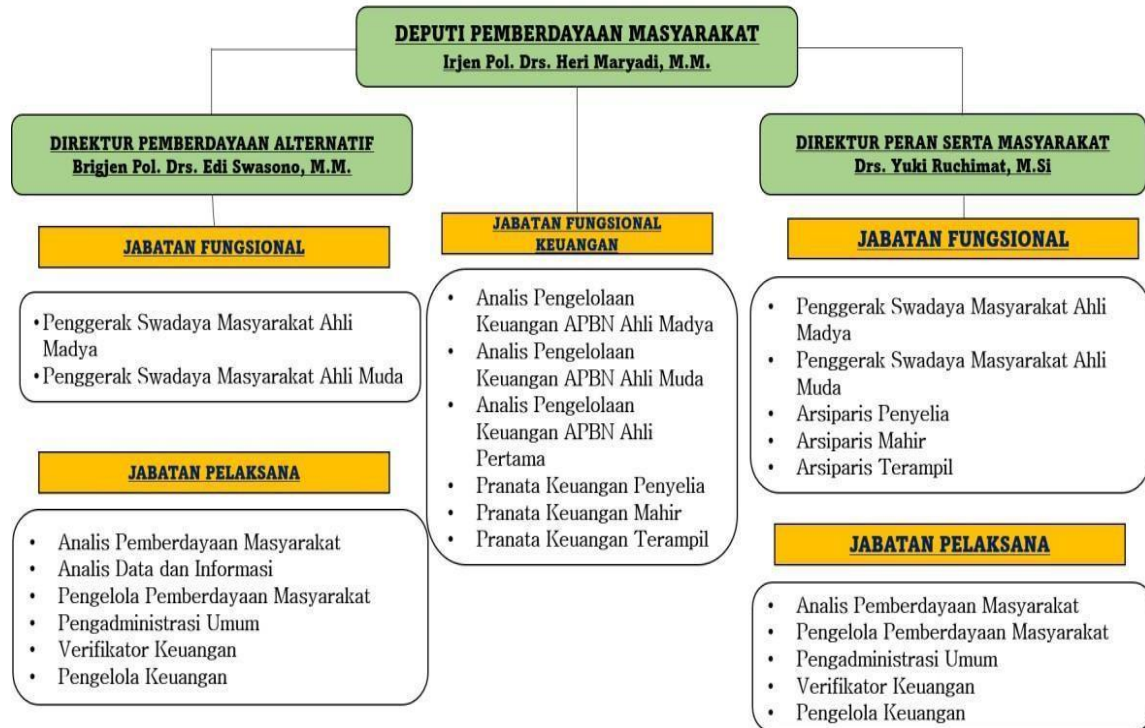
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Secara Struktural, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah Kepala BNN dan membawahi dua Direktora, yaitu: Direktorat Peran Serta Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif. Selengkapnya, Struktur Organisasi pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Adapun visi BNN sebagaimana disajikan dalam Renstra BNN 2025-2029 adalah menterjemahkan visi Presiden 2020-2024, yaitu "Bersih Narkoba untuk Mewujudkan SDM Unggul bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Perwujudan visi BNN sendiri tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, yang memandang pembangunan nasional sebagai proses transformasi, dengan periode lima tahun pertama diarahkan untuk memperkuat landasan transformasional tersebut. Terdapat 7 (tujuh), saah satunya adalah Pemberdayaan dan Reintegrasi Masyarakat Mendorong peran aktif masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam mendukung penyintas dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pemulihan dan anti-stigmatisasi.

Dengan demikian, "Bersih Narkoba" tidak hanya menandai ketiadaan narkoba secara fisik, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial yang tangguh, sistem hukum yang efektif, serta upaya pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Kedeputian pemberdayaan Masyarakat BNN di Tahun 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN pada tahun 2024, untuk kemudian diharapkan mendapat masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Kedeputan Pemberdayaan Masyarakat yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang berisiko terkait masa depan organisasi, dengan memanfaatkan pengetahuan yang bersifat antisipatif. Proses ini mencakup pengorganisasian secara sistematis atas upaya pelaksanaan keputusan serta pengukuran hasil melalui mekanisme umpan balik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman pada renstra. Perubahan tersebut disusun secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan, serta diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi BNN. Perencanaan ini bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) serta meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), sebagai kebutuhan nyata dalam menjawab berbagai permasalahan aktual yang dihadapi.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran strategis berupa meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa jumlah kabupaten/kota yang berkategori Tanggap Ancaman Narkoba.

Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba merupakan kondisi ketanggapsiagaan suatu wilayah dalam melakukan penanganan ancaman narkoba, sekaligus menjadi kerangka acuan bagi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota—baik unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat—untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program intervensi

penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif.

Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, yang dilaksanakan melalui survei dan pendataan kondisi aktual daerah. Pengukuran tersebut menggunakan instrumen ketanggapsiagaan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba yang mencakup aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Indikator Kinerja Utama ini selanjutnya diturunkan secara berjenjang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada dua direktorat di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat diarahkan pada meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap P4GN, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat. Sementara itu, renstra Direktorat Pemberdayaan Alternatif difokuskan pada meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja berupa status keterpulihan kawasan dari kategori Bahaya atau Waspada menjadi Waspada, Siaga, atau Aman. Status keterpulihan kawasan rawan narkoba ditentukan berdasarkan Indeks Keterpulihan Kawasan yang telah memperoleh intervensi melalui program pemberdayaan alternatif.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penetapan kinerja yang disusun setiap tahun oleh satuan kerja pada suatu lembaga sebagai bentuk komitmen kinerja. Dokumen ini berfungsi sebagai pernyataan kinerja, kesepakatan kerja, atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan kinerja pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa jumlah kabupaten/kota yang berkategori Tanggap Ancaman Narkoba, dengan target capaian pada Tahun 2025 sebanyak 170 kabupaten/kota.

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota berkategori "Tanggap ancaman narkoba"	170 Kab/Kota

Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun. 2025 yaitu meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan dengan target tahun 2025 yaitu sejumlah 90 kawasan.

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Secara Berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2025 yaitu 3,6 berkategori Mandiri.

Tabel 2.3. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,6 Indeks (kategori Mandiri)

C. PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Deputy Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025 memiliki sasaran program yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap Ancaman

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori tanggap ancaman narkoba dan dengan target kinerja sejumlah 170 kabupaten/kota.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Jumlah kabupaten/kota berkategori “Tanggap Ancaman narkoba”	170 Kabupaten/Kota

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat T.A. 2025 memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dengan indikator kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi. Adapun target kinerja tahun 2025 sebesar 3,66.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,66 Indeks

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A. 2025 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Secara Berkelanjutan. Jumlah target kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan berjumlah 90 kawasan.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Secara Berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan

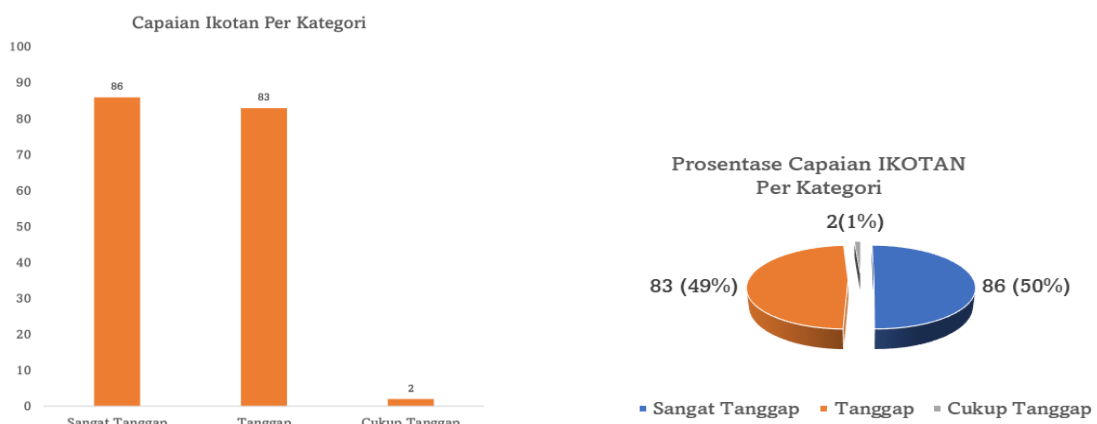
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan tahapan penting pencapaian target pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dimana RPJMN 2025–2029 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target Asta Cita yang relevan dengan isu narkoba menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan ketahanan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan peran keluarga, komunitas, dan lembaga sosial dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang aman, berkeadilan, dan berkeadaban.

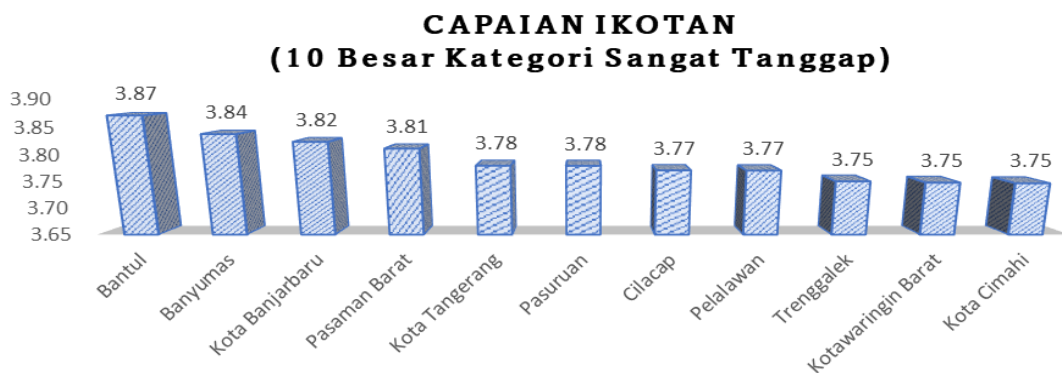
A. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA JANGKA MENENGAH NASIONAL DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2021–2025)

1. Capaian Kinerja Tahun 2025



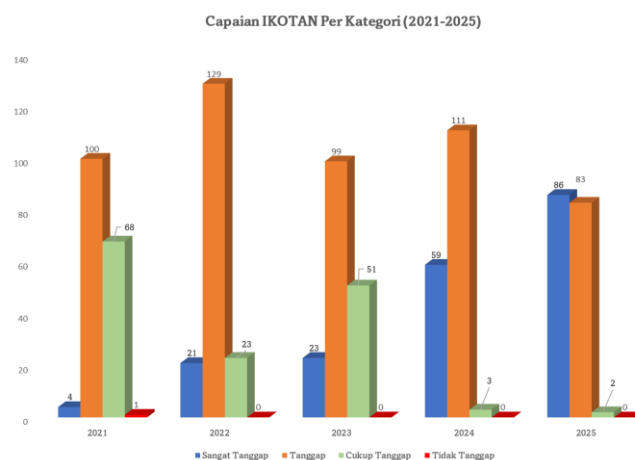
Grafik 3.1. Capaian Ikotan per Kategori Tahun 2025

Tahun 2025, dari 169 kabupaten/kota yang dihitung dengan target 170 kabupaten/kota, capaian IKOTAN menunjukkan bahwa sebanyak 86 kabupaten/kota (50%) berada pada kategori sangat tanggap, 83 kabupaten/kota (49%) pada kategori tanggap, dan 2 kabupaten/kota (1%) pada kategori cukup tanggap.



Grafik 3.2. 10 Nilai IKOTAN Tertinggi Tahun 2025

Capaian IKOTAN kategori sangat tanggap pada tahun 2025 mencakup 86 kabupaten/kota, dengan nilai indeks tertinggi sebesar 3,87 dan nilai terendah sebesar 3,31. Sepuluh kabupaten/kota dengan nilai indeks tertinggi berada pada rentang 3,75–3,87, yaitu secara berturut-turut Kabupaten Bantul (3,87), Kabupaten Banyumas (3,84), Kota Banjarbaru (3,82), Kabupaten Pasaman Barat (3,81), Kota Tangerang dan Kabupaten Pasuruan (3,78), Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pelalawan (3,77), serta Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Cimahi (3,75).



Grafik 3.3. Capaian IKOTAN 2021-2025

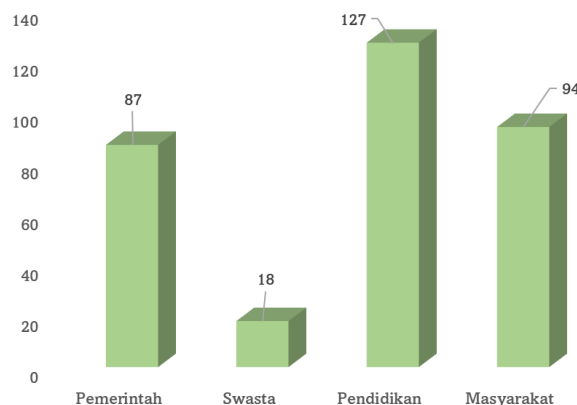
Capaian IKOTAN pada periode 2021–2025 untuk kategori sangat tanggap menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan semakin baiknya pemahaman pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat terhadap strategi terpadu P4GN dalam meningkatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga, ketahanan

masyarakat, ketahanan kewilayahan, ketahanan kelembagaan, serta penegakan hukum, yang dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas Penggiat P4GN sebagai perpanjangan tangan BNN di lingkungan instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pendidikan.

Selain itu, kabupaten/kota dengan kategori sangat tanggap telah mampu mengenali potensi dan kerentanan wilayahnya, serta memiliki mekanisme antisipasi dan mitigasi terhadap ancaman dari luar, sehingga tercipta lingkungan yang responsif dan adaptif terhadap ancaman narkoba. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketanggapsiagaan yang sangat baik dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan narkoba di masing-masing wilayah.

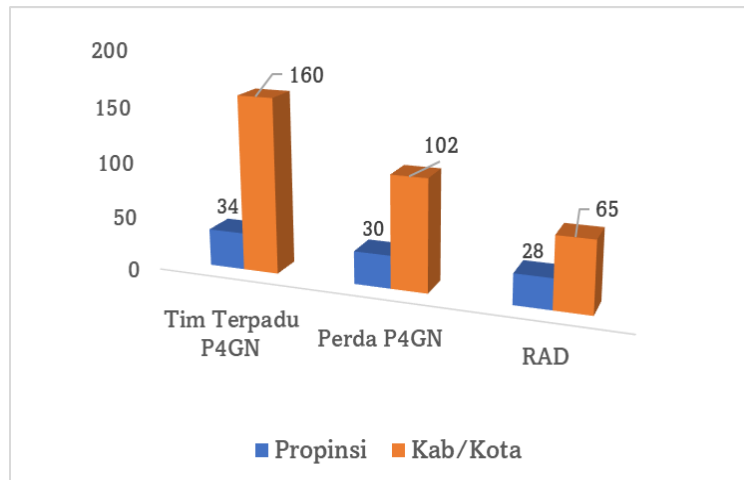
2. Capaian Kinerja Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2025

Capaian jumlah lembaga sebanyak 326 Lembaga dari 4 lingkungan yang terdiri dari 87 lembaga pemerintah, 18 lembaga swasta, 127 lembaga Pendidikan dan 94 lembaga masyarakat.



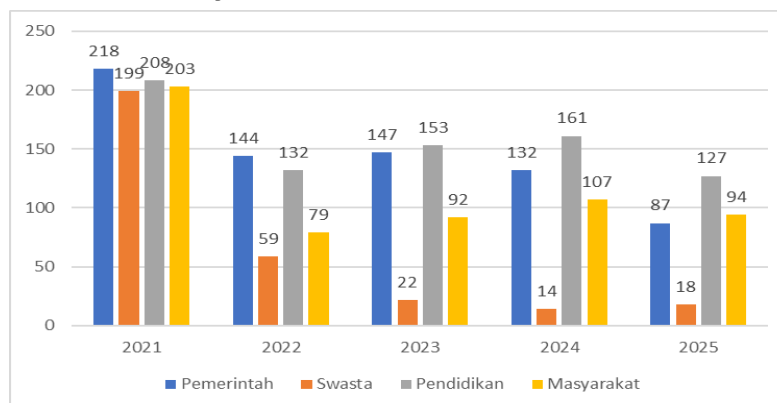
Gambar 3.5. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2025

Capaian advokasi kebijakan KOTAN juga merupakan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang didukung dengan sejumlah kebijakan baik di provinsi maupun Kab/Kota meliputi: pembentukan Tim terpadu P4GN yang ada di 34 provinsi (160 Kab/Kota), sejumlah 30 Propinsi (102 Kab/Kota) yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang P4GN, serta 28 Provinsi (65 Kab/Kota) yang telah menuangkan dalam Rencana Aksi Daerah.



Grafik 3.6. Kebijakan yang mendukung Advokasi Kebijakan KOTAN 2025

3. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2025



Grafik 3.7. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2025

Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lingkungan masyarakat secara kuantitas mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 61,08% pada periode 2021–2022, sebagai dampak langsung pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada periode 2022–2025 terjadi peningkatan capaian sebesar 35,44%, seiring dengan masa transisi menuju tatanan normal baru (new normal) yang turut memengaruhi dinamika sosial masyarakat.

Pada lingkungan pendidikan, capaian advokasi kebijakan KOTAN pada periode 2021–2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 36,50%, akibat pembatasan aktivitas tatap muka selama pandemi. Namun demikian, pada periode 2022–2024 terjadi peningkatan capaian yang cukup berarti sebesar 21,97%. Dinamika ini dipengaruhi oleh penerapan pembelajaran jarak jauh, proses adaptasi kebiasaan baru, serta peralihan ke Kurikulum Merdeka yang memengaruhi fokus dan prioritas civitas akademika.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lembaga swasta dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam secara kumulatif, yakni sebesar 92,96%. Penurunan tersebut terjadi secara bertahap, yaitu 70,40% (2021–2022), 62,70% (2022–2023), 57,14% (2023–2024), dan 17,22% (2024–2025), yang dipengaruhi oleh penyesuaian dan kebijakan fiskal dalam negeri.

Sementara itu, capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lembaga pemerintah menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada periode 2021–2022 terjadi penurunan sebesar 33,90%, kemudian meningkat sebesar 2,10% pada 2022–2023, kembali menurun sebesar 11,36% pada 2023–2024, dan pada periode 2024–2025 kembali mengalami penurunan sebesar 25,67%.

B. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUNAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

1. Capaian Kinerja Kegiatan

Seperti dijabarkan pada bagian sebelumnya Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif tahun 2025 masih mengacu pada desain kinerja pada tahun 2024 dengan sasaran kegiatan “meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan”. Adapun indikator kinerjanya adalah jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami derajat keterpulihan dengan target 90 kawasan. Derajat keterpulihan keterpulihan kawasan merupakan tingkat keterpulihan kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program P4GN khususnya program pemberdayaan alternatif. Derajat keterpulihan didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) pada akhir tahun anggaran berjalan dalam hal ini tahun anggaran 2025. Keterpulihan diukur mengacu pada perubahan nilai IKRN pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba

NO	STATUS AWAL	INDEKS AWAL	INDEKS AKHIR	STATUS KETERPULIHAN	STATUS AKHIR
1	Bahaya	1,00-1,20	1,21–1,40	Pulih	Bahaya
2	Bahaya	1,21–1,40	1,41–1,60	Pulih	Bahaya
3	Bahaya	1,41–1,60	1,61–1,77	Pulih	Waspada
4	Waspada	1,61–1,77	1,78–1,94	Pulih	Waspada

5	Waspada	1,78–1,94	1,95–2,10	Pulih	Waspada
6	Waspada	1,95–2,10	2,11–3,50	Pulih	Siaga/Aman

Pada akhir Desember 2025 tercatat bahwa jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami derajat keterpulihan sebanyak 87 kawasan rawan narkoba.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2025

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan	87 Kawasan	96,67

2. Capaian Kinerja Rincian Output

Kegiatan pemberdayaan alternatif yang diselenggarakan secara nasional tercermin dalam tabel capaian kinerja (output) pemberdayaan alternatif Tahun 2025. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 90 kawasan yang mendapatkan intervensi penyelenggaraan pemberdayaan alternatif, sebagaimana tertuang dalam DIPA Awal yang disahkan pada bulan Desember 2024. Target tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) Rincian Output (RO):

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Rincian Output Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN	%
1	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	9 kelompok masyarakat	11 kelompok masyarakat	122,22
2	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	81 kelompok masyarakat	90 kelompok masyarakat	111,11
3	Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberdayaan Alternatif	1 Juknis	1 Juknis	100

Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran tingkat keterpulihan kawasan setelah dilaksanakan intervensi program pemulihan. Suatu kawasan dinyatakan pulih apabila menunjukkan peningkatan derajat keterpulihan dibandingkan kondisi awal sebelum intervensi. Intervensi program pemulihan dilaksanakan melalui pendekatan P4GN yang meliputi aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, dan kerja sama.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari target 90 kawasan rawan narkoba, capaian keterpulihan mencapai 87 kawasan atau sebesar 96,67 persen. Dari 90 kawasan yang telah diintervensi sesuai target, sebanyak 87 kawasan dinyatakan pulih, sedangkan 4 desa/kelurahan dinyatakan belum pulih.

Secara keseluruhan, jumlah kawasan yang mendapatkan intervensi program P4GN tercatat sebanyak 101 kawasan, dengan rincian sebagai berikut: 51 kawasan mengalami perubahan status dari bahaya menjadi waspada, 11 kawasan dari bahaya menjadi siaga, 21 kawasan dari waspada menjadi siaga, 4 kawasan mengalami peningkatan nilai indeks tanpa perubahan status, 9 kawasan dinyatakan belum pulih, serta 5 kawasan belum dilakukan pengukuran keterpulihan.

Tabel 3.4. Perubahan Derajat Keterpulihan Kawasan Tahun 2025

NO	PERUBAHAN	STATUS KETERPULIHAN	JUMLAH KAWASAN
1	Bahaya ke Bahaya	pulih	2
2	Bahaya ke Waspada	pulih	51
3	Bahaya ke Siaga	pulih	11
4	Waspada ke Waspada	pulih	2
5	Waspada ke Siaga	pulih	21
6	Waspada ke Waspada	belum pulih	8
7	Siaga ke Waspada	belum pulih	1
8	Belum diukur		5
	Total		101

a. Capaian Rincian Output QDD.002

Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika (3248.QDD.002),

terjadi over prestasi atas kinerja yang pada awalnya ditargetnya sebanyak 81 kawasan intervensi tercapai 90 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Rincian Output QDD.002

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	BNNP Aceh	DIPA	Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe	Pelatihan Perbengkelan	25
2	BNNK Langsa	DIPA	Gampong Alue Dua, Kec Langsa Baro, Kota langsa	Pelatihan bengkel las	20
3	BNNP Sumut	DIPA	Desa sidorejo, kecamatan medan tembung, Kota Medan	pelatihan barbershop	15
4	BNNK Tanjungbalai	DIPA	Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar kota tanjungbalai	Budidaya ikan lele dalam ember dan tanaman hidroponik	20
5	BNNK Deli Serdang	DIPA	Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang	Kuliner	25
6	BNNK Labuhanbatu Utara	DIPA	Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Budidaya Tanaman Pepaya Kalifornia	20
7	BNNP Sumsel	DIPA	Kantor Desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten Oki	Kuliner pembuatan mie, Pembuatan Kerupuk dan terasi udang, aneka roti	20
8	BNNP Sumbar	DIPA	Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan lubuk begalung,	Kuliner	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
			Kota Padang		
9	BNNK Solok	DIPA	Nagari Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok	Pelatihan Membatik di Nagari Koto Laweh dan Pelatihan Membuat Keripik Talas Kulit di Nagari Koto Anau	30
10	BNNP Bengkulu	DIPA	Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu	Pelatihan Kuliner/Pengolahan Ikan Laut	20
11	BNN Kota Bengkulu	DIPA	Balai Kelurahan Tanjung Agung, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu	Pelatihan Kuliner Khas Bengkulu	20
12	BNNP Babel	DIPA	desa sungai selan atas kec Sungai selan, bangka tengah	Pelatihan Barista Kopi	20
13	BNNK Bangka Selatan	DIPA	Kelurahan Tanjung Ketapang, Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan	Pengolahan Hasil Laut	20
14	BNNP Jambi	DIPA	Desa Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi	Budidaya Ikan lele	10
15	BNNK Batang Hari	DIPA	Desa Mekar Sari NES, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari	budidaya ikan lele	20
16	BNNP Kepri	DIPA	Kel muka kuning, Kec sei beduk, Kota Batam	pelatihan pembuatan aneka jajanan pasar	15
17	BNNP Riau	DIPA	Kelurahan Kampung dalam, Kecamatan senapelan Kota	tata boga	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
			Pekanbaru		
18	BNNP Lampung	DIPA	Balai Desa Suka Jawa, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah	Budidaya maggot dan tanaman saledri	15
19	BNNK Lampung Selatan	DIPA	Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan	Pembuatan Roti	20
20	BNNP Sulteng	DIPA	Kel. Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Pelatihan kuliner	15
21	BNNK Palu	DIPA	Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Pelatihan Tata Boga Pembuatan Kue dan Roti	20
22	BNNP Sulawesi Tenggara	DIPA	Kelurahan Nambo, Kec. Abeli, Kota Kendari, Sultra	Pelatihan Kuliner/Pembuat n makanan dari bahan baku ikan	20
23	BNNK Kolaka	DIPA	Kecamatan Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kab. Kolaka	Pelatihan Pengolahan Ikan Laut	20
24	BNNP Sulawesi Utara	DIPA	Kelurahan Sindulang Satu, Kec. Tuminting, Kota Manado	Pelatihan Kuliner Pembuatan Kue	20
25	BNNK Bolaang Mongondow	DIPA	Desa Otam, Kec. pasi barat, Kab. Bolmong	Pelatihan membuat Gula semut dan Pelatihan membuat Brown Sugar/ Palem Sugar	20
26	BNNP Sulawesi Selatan	DIPA	Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar	Service HP	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
27	BNNK Palopo	DIPA	kelurahan salotellu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	Kuliner	30
28	BNNP Sulawesi Barat	DIPA	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju	Kuliner berbahan dasar ikan, pembuatan sambal goreng kemasan khas Mamuju	20
29	BNNK Polewali Mandar	DIPA	Cafe Salili Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar	Kuliner (Prozen Food: Dimsum dan Sempol)	20
30	BNNP Gorontalo	DIPA	Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango	Pelatihan Kuliner Pembuatan kue & Pertanian (budidaya cabe)	20
31	BNN Kota Gorontalo	DIPA	Aula Kantor Lurah Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	Pelatihan Social Media Marketing	20
32	BNNP DKI	DIPA	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta barat	Kuliner makanan dan minuman	20
33	BNNK Jakarta Utara	DIPA	Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara	Pelatihan Cuci Steam Motor	20
34	BNNK Jakarta Selatan	DIPA	Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota, Jakarta Selatan	Barista	16
35	BNNK Jakarta Timur	DIPA	Kelurahan Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	Kuliner (Nasi Box dan Snack Box)	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
36	BNNP Jawa Barat	DIPA	Desa Ujung Genteng, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi	Pemanfaatan Limbah Kerang Menjadi Produk Kerajinan Tangan	20
37	BNNK Depok	DIPA	Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok	Craft Rajut	20
38	BNNK Bogor	DIPA	Kantor Desa Jabon Mekar, Kec. Parung, Kabupaten Bogor	Tanaman Hias Retiping	20
39	BNNK Bandung	DIPA	Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiara Codong	Pelatihan Afiliator E- Ecomers	20
40	BNNK Karawang	DIPA	Desa Pasir Jaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang	Pengelolaan Pupuk	20
41	BNNK Cirebon	DIPA	Desa Haurgeulis, Indramayu	Pelatihan Olahan Mangga & Ternak Kambing	20
42	BNNP Banten	DIPA	Kelurahan Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	Handycraft pengelolaan plastik sampah menjadi tanaman hias dan pembuatan lilin dari minyak bekas pakai (Jelantah)	20
43	BNNP Banten	NON DIPA	Kelurahan Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	life guard	15
44	BNNP Banten	NON DIPA	Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak (Baduy Luar)	Pelatihan Instalasi Listrik	20
45	BNNP Banten	DIPA	Desa Talaga Kec. Mancak	kertas daur ulang dari Pelepah Pisang	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
46	BNNK Tangerang	DIPA	Kelurahan Periuk	Pelatihan Barista	20
47	BNNP DIY	DIPA	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista dan Kuliner	20
48	BNNK Yogyakarta	DIPA	Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Pengolahan Sampah	20
49	BNNP Jawa Tengah	DIPA	Kel. Parwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Abon Ikan Bandeng	15
50	BNNP Jawa Tengah	HIBAH	Kel. Kaligawe, Kecamatan	(pelatihan olahan ikan amplang dan kerupuk)	15
51	BNNK cilacap	DIPA	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi	pelatihan UMKM	25
52	BNNK cilacap	NON DIPA	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi	pelatihan UMKM	25
53	BNNK Cilacap	Non DIPA	Desa Adiraja Kecamatan Adipala, Cilacap	Bimbingan teknis life skill dan sosialisasi P4GN - Google Drive	20
54	BNNK Surakarta	DIPA	Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta	Pelatihan barista alat seduh manual	20
55	BNNP Jatim	DIPA	Kantor Lurah Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya	Pelatihan Urban Farming Budidamber	20
56	BNNP Jatim	DIPA	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Pembuatan Produk Kreatif Daur Ulang Sampah Plastik	20
57	BNN Kota Batu	CSR	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Pengelolaan Limbah Sampah, Budidaya Lele dan Tanaman	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
				Pekarangan	
58	BNNK Lumajang	DIPA	Kelurahan/Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang	Pembuatan Pakan Ternak Selase (Pakan Ternak Fermentasi)	20
59	BNNK Tuban	NON DIPA	Desa Tegalagung Kecamatan Semanding	Pelatihan Sablon	50
60	BNNP Kaltim	DIPA	Kelurahan tenun, Kec samarinda sebrang, Kota Samarinda	olahan ikan	15
61	BNNK Bontang	DIPA	Kel Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	kuliner	30
62	BNNP Kalimantan Selatan	DIPA	Kelurahan Kelayan Luar , Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalsel	Pelatihan HandyCraft dengan berbahan Kantong Plastik dan Tutup Botol	20
63	BNNK Hulu Sungai Selatan	DIPA	Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan	Potong Rambut (Barbershop)	20
64	BNNP Kalimantan Tengah	DIPA	Kelurahan Sei Gohong, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya	Pembuatan pakan ikan/pelet ikan	15
65	BNNP Kalimantan Tengah	HIBAH	Kelurahan Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Sprai dan sarung bantal	15
66	BNNK Palangka Raya	DIPA	Aula Kel. Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya	Pelatihan tata boga pengolahan ikan patin	20
67	BNNP Kalbar	DIPA	Kelurahan Dalam bugis,	Pelatihan pencucian AC	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
			Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak	dan unsur kelistrikan	
68	BNNK Sanggau	DIPA	Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kab Sanggau	Pelatihan mengolah nugget pisang dan roll pisang	20
69	BNNP Kalimantan Utara	DIPA	Kelurahan Juata Permai, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Prov. Kaltara	Hortikultura	20
70	BNNK Tarakan	DIPA	kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, Prov. Kalimantan Utara	Bakery (membuat Roti, donat, pie, dan nastar)	22
71	BNNP Bali	DIPA	Kelurahan Tuban (Desa Adat Kelan), Kec. Kuta, Kab. Badung	Pelatihan peningkatan potensi kepada kelompok Nelayan Samanjaya	15
72	BNNK Klungkung	DIPA	Desa Semarapura Kelod, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	Pelatihan Baking Kue	25
73	BNNP NTT	DIPA	Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang	Pelatihan Tata Busana Tenun Nusa Tenggara Timur	20
74	BNNK Belu	DIPA	Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT	Pelatihan Peternakan Ayam Boiler dan Pemeliharaan Bibit Boiler	20
75	BNNP NTB	DIPA	Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah	Pelatihan Kewirausahaan Minuman Kemasan (Es Kelapa, Teh dan	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
				Kopi)	
76	BNNP NTB	NON DIPA	Desa Beleka Praya Timur Lombok Tengah	Perbengkelan, Tata Rias, Tata Boga, Teknisi/service HP dan AC, Food and Beverage Service (waiters)	10
77	BNNK Sumbawa Barat	DIPA	Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	Kuliner gorengan dan ayam fried chicken	20
78	BNNP Maluku	DIPA	Desa hitu lama kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah	Jenis pelatihan pembuatan batako SNI	25
79	BNNK Buru Selatan	DIPA	Desa Fatmite Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan BNNK Buru Selatan	Olahan frozen food dari ikan (nugget ikan, bola-bola ikan, kroket singkong tuna dan abon ikan)	15
80	BNNP Maluku Utara	DIPA	Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate	Daur ulang sampah	20
81	BNNK Tidore Kepulauan	DIPA	Kelurahan Gamtufkange Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	pelatihan Barista	20
82	BNNP Papua	DIPA	Kelurahan Argapura, Distrik jayapura selatan, Kab. Jayapura	Potong Rambut (Barbershop)	20
83	BNNK Jayapura	DIPA	Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kab Jayapura	Pelatihan Instalasi Listrik Rumah Tangga	20
84	BNNP PAPUA BARAT	DIPA	Kelurahan Padarni Distrik/kec Manokwari barat,kab.manokwari	Pelatihan pembuatan aneka kripik dan Sambal Ikan	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
85	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam	Frozen Food dan krupuk Olahan Ikan Nila	50
86	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam	Budidaya Ikan Nila (Kolam Bioflog)	50
87	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	RPTRA Kampung Rawa Indah Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru	Pelatihan Pengolahan Frozen Food	50
88	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Komplek Permata, Kel. Kedaung Kalingke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Pelatihan Pengolahan Frozen Food	50
89	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Aula Kelurahan Tanah Datar Pekanbaru Riau	Kerajinan Anyaman ketupat dan pengolahan aneka sate	20
90	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kel. Muara bahari, Kel Tanjung Priok, Jakut	Frozen Food	50
91	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau	Pelatihan Sablon	50
92	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Pelataran Rumah Dinas Kepala Desa Air Itam, Kec. Penukal, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Budi daya ikan air Lele (Bioflok)	50
93	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kel Karangrejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan	Pelatihan aquaponik (Budidaya ikan lele dan budidaya sayur hidroponik)	50
94	Direktorat Pemberdayaan	DIPA	Aula Kecamatan Simbang, Desa	Makanan Ringan dan Barista	50

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
	Alternatif		Jenetaesa, Kab. Maros		
95	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Krupuk Ikan dan Amplang	50
Total			90 Desa/Kelurahan	95 Pelatihan	2.208 Peserta

Jumlah bimbingan teknis *life skill* yang dilaksanakan sebanyak 94 kali dengan jumlah peserta sebanyak 2.208 orang. Fasilitas Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dengan target 81 kelompok masyarakat telah tercapai 90 kelompok masyarakat dengan dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) 82 desa/kelurahan yang diintervensi melalui DIPA
- 2) 9 desa/kelurahan yang diintervensi melalui dana hibah/CSR
- 3) 4 desa/Kelurahan yang diintervensi melalui optimalisasi kegiatan DIPA

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan Alternatif melalui Kolaborasi/Dana Hibah/CSR sebagai berikut:

- 1) Program pemberdayaan alternatif yang bersumber pada Non DIPA diimplementasikan oleh BNNP Banten bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dilaksanakan sebanyak dua kali kegiatan yaitu Pelatihan *Life Guard* di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan peserta sebanyak 15 orang dan pelatihan instalasi listrik di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak (Baduy Luar) dengan peserta sebanyak 20 orang.
- 2) Sebagai wujud nyata kolaborasi, BNNP Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk dan amplang ikan tenggiri di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.

- 3) Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan Pelatihan Vokasional dalam rangka pemulihan kampung narkoba kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasional dan Produktivitas (BBPVP) Kemenaker, dengan lokus sebagai berikut:
 - a) Masyarakat Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng Kota Adm Jakarta Barat peserta 50 org, jenis pelatihan Kuliner Frozen Food.
 - b) Masyarakat Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat peserta 50 org, jenis pelatihan Kuliner Frozen Food.
- 4) Selain bekerjasama dengan Kemenaker, Direktorat Pemberdayaan Alternatif juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam pelatihan Bimtek *Life Skill* vokasional untuk masyarakat Kelurahan Tj.Uma, Kecamatan Lubuk Baja dengan jumlah peserta 50 orang, jenis pelatihan merupakan hasil pelatihan life skill sebelumnya yaitu budidaya ikan Nila diolah menjadi nugget dan krupuk ikan Nila.
- 5) Kegiatan Bimtek Life Skill bagi Masyarakat kawasan rawan narkoba yang diselenggarakan melalui sinergi atau Non DIPA BNN, meliputi:
 - a) BNNK Tuban, kerjasama dengan Pemerintah Desa Desa Tegalagung Kecamatan Semanding.
 - b) BNNK Cilacap, bersinergi dengan Pemerintah Desa Karangkemiri, Prodi Kewirausahaan dan Bisnis Digital UNAIC, DPKUKM, DPMPTSP dan Pelaku Usaha Jajankoe Cilacap, Piqpiko dan EO Car Free Day Cilacap.
 - c) BNNP Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Lombok Tengah melaksanakan kegiatan bimtek *life skill* di Desa Beleka Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan keterampilan Perbengkelan, Tata Rias, Tata Boga, Teknisi/service HP dan AC, Food and Beverage Service (waiters) dengan jumlah peserta 10 orang.

b. Capaian Rincian Output QDD.001

Rincian Output Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.QDD.001), terjadi over prestasi atas kinerja yang pada awalnya ditargetnya sebanyak 9 kawasan intervensi tercapai 11 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Rincian Output QDD.001

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Kerajinan Anyaman Bambu	20
2	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Huta Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Kerajinan Rotan	50
3	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Jurong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Pakan Unggas berbentuk Pellet	20
4	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar	Budidaya Jagung Pipil dan Jagung Manis	50
5	BNNK Gayo Lues	DIPA	Desa Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Gayo Lues	Pelatihan Barista Kopi	35
6	BNNK Lhokseumawe	DIPA	Desa Blang Banyak	Pembuatan Piring dari Pelepah Pinang	30
7	BNNK Lhokseumawe	DIPA	Desa Teupin Rusep	Pembuatan Piring dari Pelepah Pinang	30
8	BNNP Aceh	DIPA	Gampong Leungah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar	Pelatihan Budidaya Tanaman Cabe	30
9	BNNK Aceh Selatan	DIPA	Dusun Tanah Munggu desa Durian Kawan Kec Kluet Timur	Pelatihan Budidaya Kacang Koro	20
10	BNNK Bireuen	DIPA	Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang	Pelatihan Menjahit	15
11	BNNK Bireuen	DIPA	Desa Salah Sirong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Pelatihan Menjahit	15
12	BNNK Mandailing Natal	DIPA	Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Budidaya Tanaman Jagung	15
Total			11 Desa	12 Pelatihan	330 Peserta

Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target 9 kelompok masyarakat tercapai 11 kelompok masyarakat yang diintervensi melalui optimalisasi anggaran dengan jumlah total masyarakat yang dilatih sebanyak 330 orang. Tidak hanya program Bimtek Life skill saja yang dilakukan, tetapi melalui program GDAD alih budidaya komoditi alternatif pertanian dan peternakan.

Tabel 3.7. Data Petani dan Luas Lahan Program GDAD Tahun 2025

NO	SATKER	KAB/ KOTA	LOKUS	KEGIATAN/ KOMODITAS	PETANI (ORG)	LAHAN (HA)
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Aceh Besar	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur	Budidaya Jagung	50	4
2	Dit Dayatif dan BNNK Madina	Mandailing Natal	Desa Aek Nabara	Penandatanganan Kerja Sama pengembangan komoditas tanaman pisang abaka	20	67
3	BNNP Aceh	Aceh Besar	Desa Leungah Kec. Seulimum	Kegiatan Berdikari Tani kerjasama Bank Indonesia • Penyerahan 3 Unit Hand Traktor dan 3 Sarana dan Prasarana Irigasi Tetes • Budidaya Cabe	30	5,5
4	BNNK Bireuen	Bireuen	Gampong Salah Sirong Jaya Kec. Jeumpa	Budidaya jagung	40	20
5	BNNK Mandailing Natal	Mandailing Natal	Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur	Budidaya jagung	15	5
6	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Aceh Utara	Desa Jurong, Kec. Sawang	1. Budidaya ayam pedaging	12	-
				2. <i>Breeding</i> domba	25	-

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Direktorat Pemberdayaan Alternatif berkolaborasi, bermitra, dan berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari K/L, Pemerintah Daerah, hingga sektor swasta, dalam rangka memulihkan kawasan rawan narkoba. Beberapa capaian sinergi pemangku kepentingan bersama Direktorat Pemberdayaan Alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016–2025 di Provinsi Aceh telah memasuki periode akhir, yaitu fase terwujudnya wilayah Agropolitan dan Agrowisata. Salah satu lokasi yang menunjukkan capaian signifikan adalah Kabupaten Gayo Lues, dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Terbentuknya Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar sebagai koperasi binaan BNN yang berperan sebagai *offtaker* atau pembeli komoditas kopi GDAD dari masyarakat.
 - b) Terbangunnya pabrik pengolahan kopi menggunakan mesin *huller* untuk mengolah kopi dari buah merah menjadi green bean, yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
 - c) Terbangunnya *green house* sebagai sarana penjemuran kopi (*green bean*) guna menjaga kualitas produk secara efektif dan efisien.
 - d) Terjadinya ekspansi lahan kopi hingga mencapai 3.086 hektare, melibatkan 2.961 petani dari 126 kelompok tani. Kawasan ini juga telah berkembang menjadi agrowisata dengan demplot seluas 35 hektare yang tersebar di 7 titik lokasi, di mana 4 lokasi merupakan perintisan agrowisata dengan konsep ngopi di kebun kopi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
- 2) Selanjutnya, Direktorat Pemberdayaan Alternatif bersama BNNK Gayo Lues dan PT Ujang Jaya International melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang di Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari mantan penanam ganja, mantan penyalahguna narkoba, dan masyarakat miskin, serta disertai dengan bantuan bibit kopi yang disalurkan melalui Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar.
- 3) Direktorat Pemberdayaan Alternatif juga melaksanakan Bimbingan Teknis Life Skill bagi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang di Gampong

Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini memberdayakan 50 petani dengan luas lahan 4 hektare melalui pengembangan komoditas jagung dan pembenihan jagung.

- 4) Di Kabupaten Mandailing Natal, Program GDAD mengembangkan komoditas pisang abaka seluas 67 hektare pada lahan Perhutanan Sosial. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara PT Serat Alam Nasional Indonesia (SANI) dengan kelompok tani yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, BNNK Mandailing Natal, dan KPH VIII Kotanopan. Selain itu, pengembangan komoditas jagung juga dilakukan di Desa Huta Bangun seluas 5 hektare dengan melibatkan 15 petani.
- 5) Implementasi GDAD juga diwujudkan melalui Launching Program Berdikari Tani di Desa Leungah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan 3 unit hand traktor dan 3 sarana prasarana irigasi tetes kepada kelompok tani binaan BNNP Aceh, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia. Pada lokasi ini turut dikembangkan komoditas cabai seluas 5,5 hektare dengan melibatkan 30 petani.
- 6) Sementara itu, pada GDAD Bireuen Tahun 2025, masyarakat tani Gampong Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa melaksanakan kegiatan bertema “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang melalui Penanaman Jagung untuk Mewujudkan Indonesia Bersinar, Indonesia Tangguh, dan Indonesia Maju”. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang petani dengan luas lahan garapan 20 hektare.

Outcomes yang diterima dihasilkan dari program GDAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Selama proses kerja sama dengan PT Ujang, Koperasi membeli Kopi dari Petani lebih tinggi daripada harga dari Tengkulak. Dimana sebelumnya Rp. 20-35 rb oleh tengkulak, kini dibeli dengan Rp. 60.000/kg. Koperasi melakukan pengolahan kopi melalui proses di penjemuran di *Green House* proses Grading Mesin Sutan di Pabrik, menjadi Green Bean Kopi Kualitas Ekspor, dimana Koperasi menjual Green bean ke PT Ujang seharga Rp. 135-140rb/kg. Disini Petani Kopi GDAD mendapatkan jaminan standar harga jual lebih tinggi dari pada tengkulak.
- 2) Pada tahun 2025 Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar telah menjual green

bean dengan kapasitas 250 ton kualitas ekspor (Grade 1) ke PT. Ujang dengan jumlah Rp. 33.750.000.000,- (33,75 M)

- 3) Komoditas kopi GDAD bukan hanya bermanfaat bagi petani kopi saja tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lainnya seperti upah panen Rp. 30.000 per kaleng (10 kg buah merah) dan dari koperasi mampu memberikan upah dari gabah ke green bean Rp. 500,- per kg, upah penjemuran Rp. 500,- per kg dan upah jasa transportasi ke PT. Ujang Jaya International Rp. 600,- per kg, hal ini tentunya menekan angka kemiskinan juga mengurangi pengangguran di Kabupaten Gayo Lues.
- 4) Benefit bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues:
 - Saat ini, kopi GDAD akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gayo Lues dengan retribusi Rp. 250,-/kg dan estimasi produksi 300 ton/tahun setara Rp. 75 Juta/tahun.
 - Regulasi/Peraturan Bupati (Qhanun) akan menertibkan proses penjualan green bean keluar Gayo Lues sehingga akan meningkatkan peran koperasi (dari pembelian gabah s.d. pengolahan menjadi green bean). Peraturan ini akan mendorong penghasilan lebih tinggi ke Gayo Lues.
 - Estimasi PAD yang akan diperoleh setelah adanya regulasi sebesar Rp. 400 juta/tahun (800 ton x 2 kali panen x Rp. 250,-)
- 5) Dampak Program GDAD bagi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - 1 Petani Ganja mempunyai lahan 2 ha; per Ha lahan menghasilkan 2 ton ganja kering siap pakai. Dalam 2 ha menghasilkan 4 ton (4 juta gram) ganja kering.
 - Berdasarkan perhitungan Anatomy of Crime 5 gr ganja kering cukup membuat addict, maka setiap keberhasilan pemberdayaan 1 petani berpotensi menyelamatkan 800.000 jiwa dari penyalahguna baru ganja.
 - Dampak ekonomi dan sosial dari setiap keberhasilan pemberdayaan 1 petani berpotensi dpt efisiensi sebesar 800.000 jiwa x Rp. 30 jt (biaya Rehabilitasi per orang) = Rp. 24 Triliun/tahun

c. Capaian Rincian Output AFA

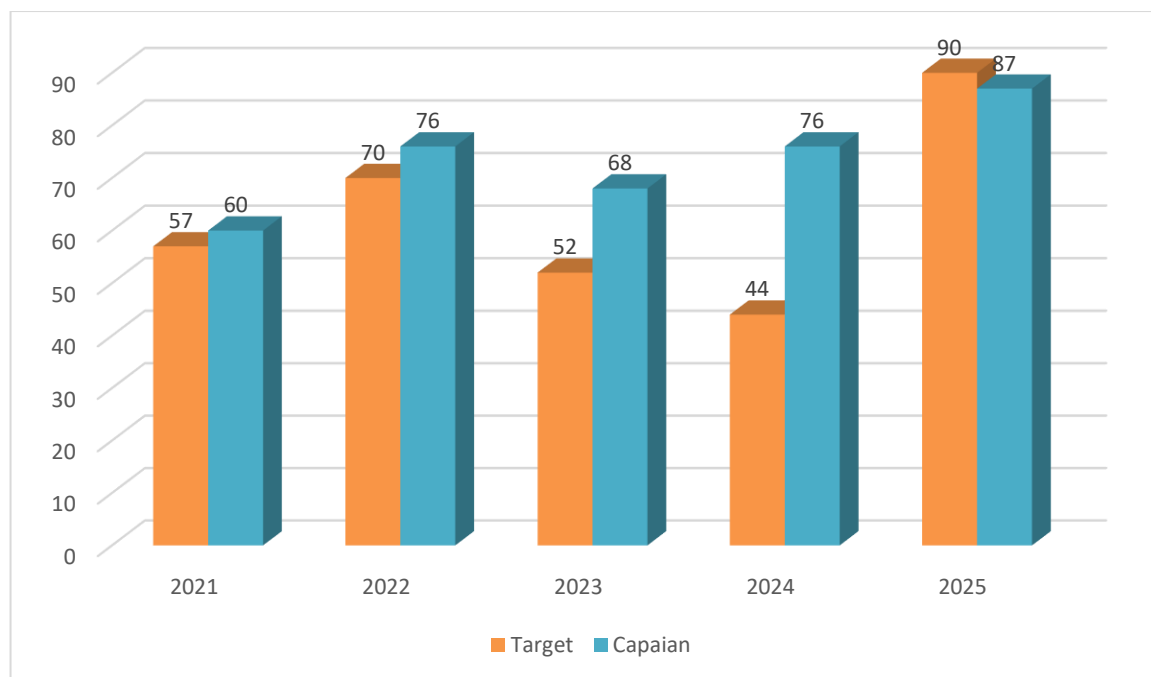
Target Rincian Output Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif (3248.AFA) adalah Penyusunan Buku Strategi Kolaborasi Penanganan Kawasan

Rawan Tanaman Terlarang dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2026–2029. Buku ini merupakan bagian pendukung Rencana Aksi P4GN Tahun 2025-2029 guna mendorong kolaborasi dan sinergi antara BNN dan K/L dalam penanganan kawasan rawan narkoba di Indonesia. Dalam penyusunannya BNN melibatkan beberapa K/L yang berkontribusi dalam Program P4GN dalam hal perumusan dan integrasi program, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pembangunan alternatif, pengembangan komoditas alternatif, peningkatan kapasitas SDM dan ketahanan nasional, serta penguatan infrastruktur dan lingkungan.

C. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2025

1. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir (2021–2025)

Pada analisis dan evaluasi realisasi kinerja kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada 5 tahun terakhir (2021–2025) tercatat capaian sebagai berikut:



Grafik. 3.7 Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 s.d. 2025

Perkembangan target dan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif selama periode 2021–2025. Secara umum, capaian kinerja pada setiap tahun menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dan mampu

mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021, target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba ditetapkan sebanyak 57 kawasan dan berhasil dipulihkan sebanyak 60 kawasan, sehingga capaian kinerja melampaui target. Tren positif berlanjut pada Tahun 2022 dengan target 70 kawasan dan capaian meningkat menjadi 76 kawasan pulih.

Pada Tahun 2023, meskipun target ditetapkan sebesar 52 kawasan, realisasi pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba mencapai 68 kawasan pulih, menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan target. Selanjutnya pada Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 44 kawasan berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 76 kawasan pulih, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan alternatif di lapangan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menetapkan target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 90 kawasan. Realisasi capaian mencapai 87 kawasan, atau mendekati target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung pemulihan kawasan rawan narkoba melalui pendekatan pemberdayaan alternatif. Kondisi ini juga disebabkan oleh perubahan pengukuran keterpulihan kawasan rawan dibandingkan 4 (empat) Tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan komitmen dan keberlanjutan upaya Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pembinaan kawasan dari tahun ke tahun.

Efektivitas dan konsistensi capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

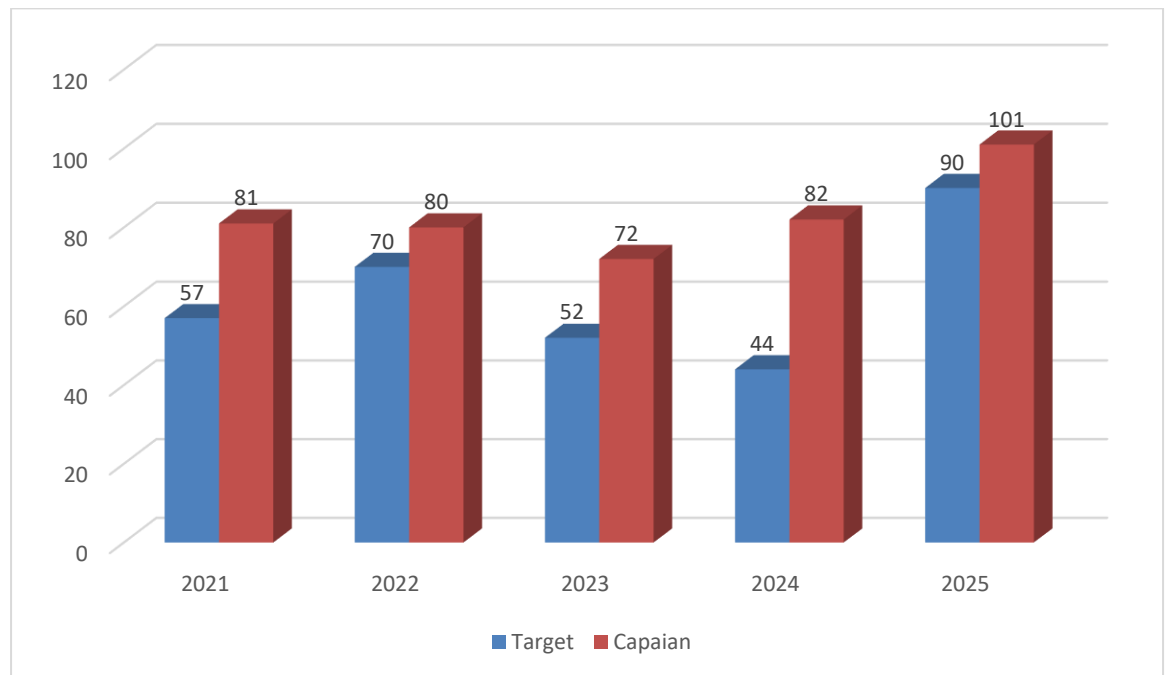
- 1) Sinergi pemangku kepentingan, baik K/L, pemerintah daerah, maupun dunia usaha, yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan capaian kinerja selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025).
- 2) Dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan kawasan rawan narkoba serta berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja selama lima tahun terakhir (2021–2025).

Optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui DIPA, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja

Direktorat Pemberdayaan Alternatif secara konsisten selama lima tahun terakhir (2021–2025).

2. Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Pada analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Rincian Output Direktorat Pemberdayaan Alternatif 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada Gambar 3.8. berikut ini:



Grafik. 3.8 Target dan Capaian Kinerja Rincian Output Pemberdayaan Alternatif TA. 2021-2025

Target yang ditetapkan setiap tahun merepresentasikan jumlah kawasan rawan narkoba yang direncanakan untuk diintervensi, sedangkan capaian menggambarkan jumlah kawasan yang berhasil diintervensi melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari DIPA, Non DIPA, Hibah, dan CSR.

Pada Tahun 2021, target intervensi ditetapkan sebesar 57 kawasan, dengan capaian sebanyak 81 kawasan atau setara dengan 142,11% dari target. Pada Tahun 2022, target meningkat menjadi 70 kawasan, dengan capaian mencapai 80 kawasan atau 114,29% dari target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023, target intervensi ditetapkan sebesar 52 kawasan, sementara capaian mencapai 72 kawasan atau 138,46%, yang menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Selanjutnya pada Tahun 2024, target intervensi ditetapkan sebanyak 44 kawasan, namun capaian meningkat signifikan menjadi

82 kawasan atau setara dengan 186,36% dari target. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif.

Pada Tahun 2025, target intervensi kembali ditingkatkan menjadi 90 kawasan, dengan capaian realisasi sebesar 101 kawasan atau 112,12% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan konsolidasi program serta sinergi pendanaan dari DIPA, Non DIPA, Hibah, dan CSR dalam memperluas cakupan intervensi kawasan rawan narkoba.

Secara keseluruhan, capaian kinerja rincian output Direktorat Pemberdayaan Alternatif selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi kawasan rawan narkoba berjalan sangat efektif, dengan persentase capaian yang secara konsisten melampaui target tahunan dan menunjukkan tren penguatan kinerja program dari tahun ke tahun.

D. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUNAN DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Capaian Kinerja Kegiatan

Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat pada Tahun 2025 ditetapkan dengan sasaran kegiatan meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan adalah Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan target nilai sebesar 3,60. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKP Tahun 2025 mencapai 3,66, atau setara dengan 101,67% dari target yang telah ditetapkan.

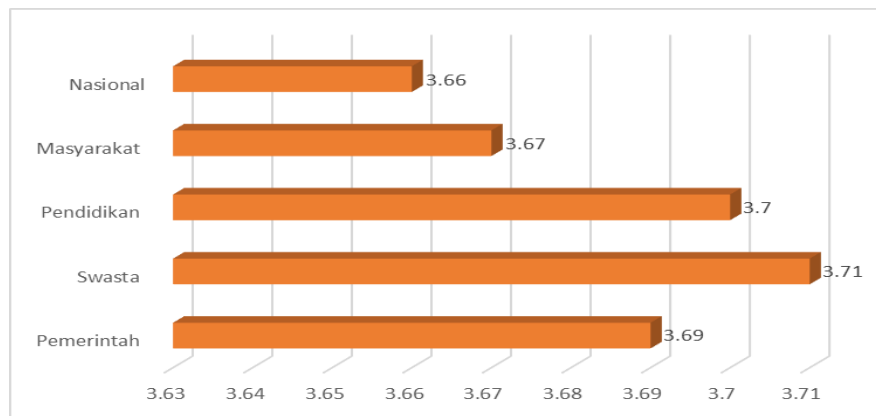
Tabel 3.8. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,6 Indeks (kategori sangat Mandiri)	3,66 Indeks (kategori Sangat Mandiri)	101.67

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 diperoleh dari hasil pengukuran pada empat lingkungan strategis, yaitu lingkungan swasta dengan nilai 3,71, lingkungan pemerintah sebesar 3,69, lingkungan pendidikan sebesar 3,70,

serta lingkungan masyarakat sebesar 3,67. Secara kumulatif, pengukuran tersebut menghasilkan IKP Nasional sebesar 3,66 yang berada pada kategori A (sangat mandiri), dengan persentase capaian sebesar 101,67%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mendukung upaya P4GN telah berada pada kondisi yang sangat baik serta melampaui target kinerja yang ditetapkan.

2. Capaian Kinerja Rincian Output



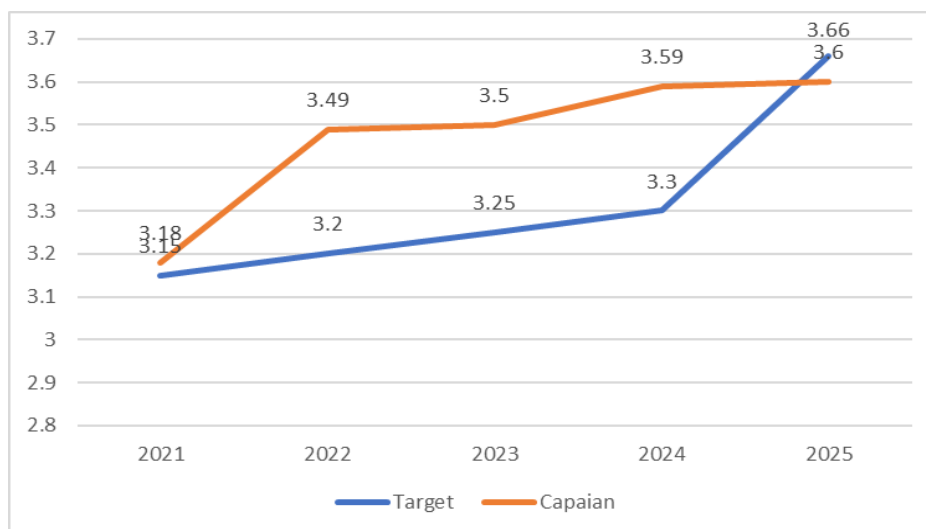
Grafik. 3.9. Capaian Kinerja Rincian Output Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2025

Capaian indeks kemandirian partisipasi pada lingkungan swasta yang sangat menonjol merupakan wujud komitmen perusahaan yang memberikan manfaat positif kepada masyarakat dan lingkungannya untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya dengan pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine.

E. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2025

1. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir (2021–2025)

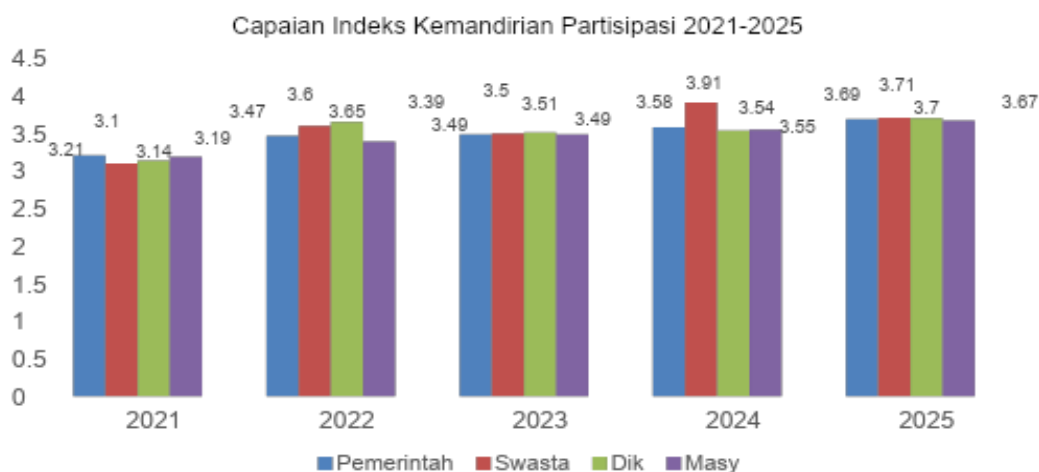
Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat tahun 2025 dengan sasaran kegiatan meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, indikator kinerja kegiatan Indeks kemandirian partisipasi sebesar 3,60 dengan capaian sebesar 3.66 (101.67%).



Grafik. 3.10. Capaian IKP Nasional Tahun 2021-2025

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2025 naik secara signifikan yang dipengaruhi baik dari sistem, partisipasi dari para Penggiat P4GN, dan kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri dari tiap-tiap lembaga (Pemerintah, Swasta, Pendidikan dan Masyarakat).

2. Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)



Grafik. 3.11. Capaian IKP Nasional Tahun 2021-2025

Kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2025 capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan pemerintah meningkat signifikan secara stabil sebesar 3,48 dan lingkungan masyarakat sebesar 14,35. Capaian pada lingkungan pemerintah dan masyarakat mengalami peningkatan secara kuantitas yang didukung adanya sistem yang berjalan dan sumber daya manusia (Penggiat P4GN) yang berpartisipasi secara aktif serta kegiatan yang dilakukan secara mandiri di lingkungannya masing-masing.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan swasta walaupun

mengalami dinamika fluktuatif sebesar 14,85 dan pada lingkungan pendidikan 14,58. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan pendidikan mengalami kenaikan secara signifikan namun pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dan setahun terakhir mengalami kenaikan drastis.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2025 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak terlalu signifikan sebesar 0.31 (9,7%) di tahun 2021- 2022, 0.01 (0,2%) di tahun 2022-2023 dan sebesar 0.09 (2,6 %) di tahun 2023-2024 yang secara kumulatif sebesar 0.41 (13,97%), sedangkan di tahun 2024-2025 sebesar 0.06 (1.94 %).

Sejalan dengan Asta Cita di awal tahun beberapa faktor yang mendukung suksesnya implementasi strategi ke deputian pemberdayaan masyarakat dalam mencapai target antara lain:

- a. Penguatan sinergitas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam program P4GN serta mendorong partisipasi aktif komunitas masyarakat baik yang bergerak di lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat, agama, babinkantibmas, PKK, dan komponen masyarakat lainnya, serta FGD dengan akademisi dalam membedah penanganan kampung narkoba, pembentukan Tim Terpadu Operasi Pesisir dan perbatasan.
- b. Penguatan dan sinergitas program kementerian/lembaga dalam membangun kekuatan intelijen sebagai salah satu upaya pendekatan *trust building* kepada masyarakat.
- c. Penguatan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai integritas dan kapabilitas dalam memperkuat strategi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja, yaitu terkait kualitas SDM dimana pengembangan kompetensi di internal BNN dalam proses implementasinya belum menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan profesionalitas yang seragam di kalangan pegawai, karena beragamnya latar belakang SDM baik pegawai yang berasal latar belakang instansi sipil maupun kepolisian. SDM yang berada di bawah satuan kerja BNNP dan BNNK belum memiliki kompetensi yang terstandar, disamping pengetahuan terkait wilayah kerja yang diemban. *Knowledge management* internal BNN masih rendah terutama pada lapisan yang bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Disamping itu, kuantitas SDM yang terbatas, namun harus mengontrol wilayah di daerah yang luas. Langkah ke depan

yang akan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah:

- 1) Penataan kembali SDM peta jabatan, pemerataan dan kompetensi, waktu pada posisi sebelumnya, serta penempatan SDM.
- 2) Peningkatan efektivitas pelaksanaan asistensi, perlu diperbaharui mekanisme asistensi (*re-design* asistensi), yang bertujuan penguatan sinergitas dan kolaborasi di bidang P4GN khususnya tematik dan ikonik.
- 3) Peningkatan efektivitas aplikasi dan enumerator sebagai penunjang pencapaian akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

F. KINERJA ANGGARAN

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun 2025 adalah proses penilaian terhadap kinerja pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan. Evaluasi ini dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Aspek-aspek yang dinilai dalam EKA meliputi penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, pencapaian keluaran (output), serta efisiensi anggaran. Dengan adanya indikator kinerja tersebut, satuan kerja dapat menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan dan besaran anggaran secara lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Realisasi anggaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik dan mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan secara efektif. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 52.093.247.000, telah direalisasikan sebesar Rp. 40.810.239.191 atau 78,34%. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248), pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 12.697.203.000, dengan realisasi sebesar Rp. 10.354.333.372 atau mencapai 81,55%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif berjalan optimal dan sebagian besar rencana kegiatan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 39.396.044.000, dengan realisasi sebesar Rp. 30.455.905.819 atau 77,31%. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan program yang cukup efektif. Kinerja anggaran diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja. IKPA disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dan terintegrasi dalam sistem Online Monitoring (OM) SPAN, yang digunakan sebagai ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja dalam aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi penggunaan anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengaitkan antara alokasi biaya dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Manfaat tersebut dituangkan dalam bentuk target kinerja yang ditetapkan pada setiap unit kerja sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025. Masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi anggaran pada beberapa komponen kegiatan.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan

NO	KEGIATAN/OUTPUT	PAGU AWAL	REALISASI	%
1	[3248] Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	12.697.203.000	10.354.333.372	81.55
2	[3257] Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	39.396.044.000	30.455.905.819	77.31
	Total	52.093.247.000	40.810.239.191	78,34

Pada Tahun Anggaran 2025, anggaran pada beberapa K/L termasuk BNN mengalami pemblokiran dengan pendekatan *automatic adjustment* untuk dialihkan dalam rangka mendukung penanganan kebijakan dan program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, besaran anggaran yang diblokir pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah sebesar Rp. 11.007.826.000. Adapun rincian pemblokiran anggaran tersebut meliputi Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248) sebesar Rp. 2.282.243.000 dan Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257) sebesar Rp. 8.725.583.000.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan pasca Blokir

NO	KEGIATAN/OUTPUT	PAGU AWAL	REALISASI	%
1	[3248] Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	10.414.960.000	10.354.333.372	99,42

NO	KEGIATAN/OUTPUT	PAGU AWAL	REALISASI	%
2	[3257] Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	30.670.461.000	30.455.905.819	99,30
	Total	41.085.421.000	40.810.239.191	99,33

Paska dilakukannya pemblokiran anggaran pada Tahun Anggaran 2025, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan kebijakan nasional serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp. 41.085.421.000, realisasi anggaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp. 40.810.239.191 atau setara dengan 99,33%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sangat optimal.

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248), pagu anggaran pasca blokir ditetapkan sebesar Rp 10.414.960.000, dengan realisasi sebesar Rp. 10.354.333.372 atau 99,42%. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif meskipun terdapat penyesuaian anggaran.

Selanjutnya, Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257) memiliki pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp. 30.670.461.000, dengan realisasi sebesar Rp. 30.455.905.819 atau 99,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal dan mampu menyerap anggaran secara maksimal. Dengan demikian, kinerja anggaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN tergolong sangat baik, adaptif terhadap kebijakan nasional, dan mampu mendukung pencapaian sasaran program secara optimal serta berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pada Tahun 2025, capaian sasaran tersebut ditunjukkan melalui jumlah Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebanyak 169 kabupaten/kota atau 99,41% dari target 170 kabupaten/kota vertikal BNN. Dari total capaian tersebut, sebanyak 86 kabupaten/kota (50,59%) berada pada kategori Sangat Tanggap dengan nilai indeks 3,25–3,91 (skala 4), sedangkan 83 kabupaten/kota (48,81%) berada pada kategori Tanggap dengan nilai indeks 2,65–3,24 (skala 4).
2. Secara nasional, Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) mencapai nilai 3,23 (skala 4) atau setara dengan 80,75 (skala 100), yang termasuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai Indeks KOTAN Nasional Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,12 atau menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan ketanggapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkoba.
3. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 90 kawasan, dengan realisasi kawasan yang berhasil dibina dan pulih sebanyak 87 kawasan, sehingga capaian kinerja mencapai 96,67% dari target yang telah ditetapkan.
4. Dalam fasilitasi Program *Alternative Development*, capaian pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang mencapai 11 kelompok masyarakat (122,22%) dari target 9 kelompok masyarakat. Sementara itu, fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika mencapai 90 kelompok masyarakat (111,11%) dari target 81 kelompok masyarakat.
5. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 diperoleh dari hasil pengukuran pada empat lingkungan strategis, yaitu lingkungan swasta dengan nilai 3,71, lingkungan pemerintah sebesar 3,69, lingkungan pendidikan sebesar 3,70, serta lingkungan masyarakat sebesar 3,67. Secara kumulatif, pengukuran tersebut menghasilkan IKP Nasional sebesar 3,66 yang berada pada kategori A (sangat mandiri), dengan persentase capaian sebesar 101,67%.

6. Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat mencapai Rp. 43.623.858.788,00 (99,07%) dari pagu sebesar Rp. 44.031.422.000,00. Sementara itu, realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif mencapai Rp. 10.354.333.372,00 (99,42%) dari pagu pasca blokir sebesar Rp. 10.414.960.000,00.

B. REKOMENDASI

1. Penguatan landasan hukum nasional, melalui penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sebagai payung hukum implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dapat diimplementasikan secara seragam oleh seluruh Pemerintah Daerah.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk merumuskan tata kelola pelaksanaan KOTAN melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan pendekatan program intervensi yang holistik, integratif, dan berkelanjutan.
3. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan sektor swasta dan filantropi, guna memperluas sumber daya, pendanaan, serta inovasi dalam pelaksanaan P4GN.
4. Optimalisasi peran penggiat P4GN, yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan, dengan penetapan lokus prioritas pada kawasan rawan, khususnya wilayah pesisir dan perbatasan, sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba.
5. Penguatan pemetaan sosial sebagai dasar penentuan jenis pelatihan *life skill* yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga selaras dengan peluang kerja maupun wirausaha dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi setempat.
6. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha/perusahaan melalui optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN



Drs. Yuki Ruchimat, M.Si



Lampiran

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur



**DOKUMENTASI KEGIATAN
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**

DOKUMENTASI DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT



**KONSOLIDASI PERAN SERTA
MASYARAKAT BERSAMA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGUATAN P4GN**



*Pemberdayaan
Pemerintah
Desa/Kelurahan
melalui Penguatan
Ekonomi Masyarakat
di Daerah Istimewa
Yogyakarta*



Kegiatan Sosialisasi P4GN dan Deteksi Dini melalui Tes Urine



Kegiatan Pemetaan Potensi Peran Serta Masyarakat Kawasan Pesisir dan Perbatasan



Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Ketanggapsiagaan Ancaman Narkoba di Jawa Tengah





*Kegiatan
Pemberdayaan
dalam
Peningkatan
Ekonomi
Masyarakat
di DKI Jakarta*



DOKUMENTASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF









**HASIL PENGUKURAN
INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN
NARKOBA (KOTAN)
TAHUN 2025**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4826/XII/DE/PM/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2025

Jakarta, 10 Desember 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

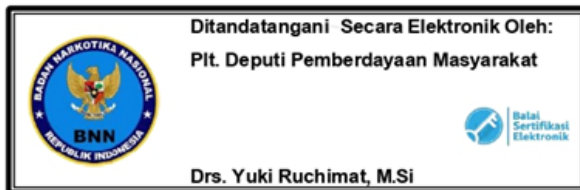
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Plt. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2025

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aceh	3.36	3.55	2.69	2.97	3.03	3.19	Tanggap	B
2.	Gayo Lues	2.52	3.72	3.33	3.19	3.21	3.17	Tanggap	B
3.	Aceh Selatan	3.27	3.40	2.47	2.65	3.07	3.04	Tanggap	B
4.	Pidie	3.33	3.58	2.53	2.85	2.88	3.13	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	3.30	3.53	2.52	2.89	2.95	3.12	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	3.46	3.31	2.60	2.89	3.05	3.13	Tanggap	B
7.	Bireuen	3.45	3.42	2.76	3.00	3.10	3.21	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	3.61	3.68	2.95	3.20	3.11	3.38	Sangat Tanggap	A
9.	Kota Lhokseumawe	3.30	3.57	2.64	2.86	2.97	3.14	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.56	3.66	2.82	3.35	3.32	3.42	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	3.45	3.58	2.57	2.90	2.89	3.18	Tanggap	B
12.	Sumatera Utara	3.24	3.42	2.85	2.95	3.00	3.14	Tanggap	B
13.	Mandailing Natal	3.14	2.98	2.20	2.20	2.66	2.70	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.05	3.51	3.10	3.28	3.36	3.28	Sangat Tanggap	A
15.	Simalungun	3.38	3.57	3.06	3.28	3.53	3.39	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN
 SURAT PERINTAH KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4826/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 10 Desember 2025

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	3.20	3.51	2.90	3.16	3.43	3.27	Sangat Tanggap	A
17.	Kota Pematang Siantar	3.02	3.34	2.55	2.93	3.01	3.03	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	3.77	3.48	3.04	3.10	3.75	3.45	Sangat Tanggap	A
19.	Kota Tebing Tinggi	3.35	3.47	2.81	3.06	3.22	3.23	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.84	3.77	3.43	3.50	3.70	3.67	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.63	3.13	2.71	2.84	3.09	2.88	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	3.31	3.45	2.91	3.31	3.34	3.31	Sangat Tanggap	A
23.	Langkat	3.32	3.33	2.56	2.57	2.48	2.93	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.42	3.85	3.52	3.77	3.76	3.68	SanTanggap	A
25.	Labuhan Batu Utara	2.98	3.88	3.24	3.49	3.43	3.43	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	3.21	3.38	2.79	3.07	3.10	3.16	Tanggap	B
27.	Batu Bara	3.08	3.64	3.42	3.52	3.24	3.39	Sangat Tanggap	A
28.	Sumatera Barat	3.33	3.29	2.57	3.10	3.10	3.39	Sangat Tanggap	A
29.	Kota Payakumbuh	3.35	3.43	2.66	3.12	3.02	3.15	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	3.74	3.84	3.52	3.85	4.00	3.19	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.13	3.61	2.93	3.29	3.45	3.81	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.33	3.29	2.57	3.10	3.10	3.32	Sangat Tanggap	A
33.	Sumatera Selatan	20.83	22.40	7.15	19.91	12.19	3.30	Sangat Tanggap	A

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	3.40	3.51	2.72	3.04	3.19	3.24	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.91	3.27	2.64	2.87	2.94	2.97	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.40	3.94	3.48	3.80	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	3.65	3.77	2.79	3.37	3.65	3.54	Sangat Tanggap	A
38.	Ogan Komering Ilir	2.94	3.83	3.45	3.47	2.94	3.45	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.95	3.83	3.45	3.67	3.95	3.73	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.24	3.52	2.63	3.15	3.24	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	3.31	3.53	2.94	3.43	3.31	3.38	Sangat Tanggap	A
42.	Ogan Komering Ulu Timur	3.37	3.37	2.26	2.59	3.37	2.97	Tanggap	B
43.	Bengkulu	3.38	3.33	2.41	2.58	2.76	2.98	Tanggap	B
44.	Bengkulu Selatan	3.41	3.40	2.49	2.59	2.70	3.01	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	3.35	3.25	2.33	2.57	2.82	2.95	Tanggap	B
46.	Jambi	3.03	3.65	3.17	3.40	3.34	3.34	Sangat Tanggap	A
47.	Batang Hari	3.35	3.56	3.18	3.24	3.27	3.35	Sangat Tanggap	A
48.	Tanjung Jabung Timur	2.61	3.70	3.34	3.45	3.57	3.31	Sangat Tanggap	A
49.	Kota Jambi	3.09	3.69	3.00	3.53	3.19	3.36	Sangat Tanggap	A
50.	Riau	3.09	3.88	3.35	3.69	3.68	3.55	Sangat Tanggap	A
51.	Kota Dumai	2.34	3.86	3.64	3.51	3.40	3.30	Sangat Tanggap	A

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.53	3.88	3.26	3.84	3.91	3.73	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.98	3.79	2.99	3.87	3.75	3.77	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Sengingi	2.64	3.97	3.50	3.57	3.66	3.44	Sangat Tanggap	A
55.	Kepulauan Riau	3.72	3.74	2.95	3.23	3.63	3.51	Sangat Tanggap	A
56.	Karimun	4.00	3.79	2.95	2.79	3.81	3.51	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.60	3.85	3.05	3.75	3.76	3.67	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	3.50	3.61	2.88	3.23	3.39	3.38	Sangat Tanggap	A
59.	Bangka Belitung	3.25	3.44	2.91	3.17	3.32	3.25	Sangat Tanggap	A
60.	Bangka Selatan	3.11	3.07	2.60	2.67	2.97	2.92	Tanggap	B
61.	Bangka	3.30	3.50	3.15	3.56	3.74	3.46	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	3.14	3.42	2.53	2.74	2.77	2.99	Tanggap	B
63.	Belitung	3.42	3.67	3.22	3.53	3.65	3.52	Sangat Tanggap	A
64.	Lampung	3.38	3.52	2.81	3.06	3.22	3.26	Sangat Tanggap	A
65.	Tanggamus	3.27	3.66	3.09	3.42	3.52	3.42	Sangat Tanggap	A
66.	Lampung Selatan	3.70	3.88	3.33	3.72	3.72	3.71	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	3.39	3.40	2.53	2.73	2.84	3.06	Tanggap	B
68.	Way Kanan	3.38	3.42	2.72	2.89	3.32	3.19	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	3.15	3.27	2.43	2.57	2.71	2.90	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	Cianjur	3.30	3.71	3.29	3.69	3.68	3.26	Sangat Tanggap	A
88.	Garut	3.42	3.76	3.15	3.66	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
89.	Kota Cimahi	3.67	3.86	3.33	3.77	3.92	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Bandung Barat	3.20	3.36	2.26	2.64	2.39	2.83	Sangat Tanggap	A
91.	DI Yogyakarta	3.53	3.82	3.28	3.66	3.65	3.63	Sangat Tanggap	A
92.	Kota Yogyakarta	3.12	3.86	3.18	3.63	3.71	3.53	Sangat Tanggap	A
93.	Bantul	4.00	3.92	3.58	3.91	3.68	3.87	Sangat Tanggap	A
94.	Sleman	3.52	3.69	3.09	3.44	3.55	3.50	Sangat Tanggap	A
95.	Jawa Tengah	3.67	3.63	2.98	3.52	3.50	3.53	Sangat Tanggap	A
96.	Kendal	3.69	3.55	3.16	3.61	3.73	3.59	Sangat Tanggap	A
97.	Temanggung	3.57	3.82	3.22	3.81	3.75	3.68	Sangat Tanggap	A
98.	Banyumas	4.00	3.89	3.50	3.89	3.61	3.84	Sangat Tanggap	A
99.	Purbalingga	3.31	3.29	2.36	2.72	2.66	2.96	Tanggap	B
100.	Batang	3.99	3.17	2.72	3.64	3.71	3.53	Sangat Tanggap	A
101.	Cilacap	3.93	3.92	3.22	3.72	3.71	3.77	Sangat Tanggap	A
102.	Magelang	3.62	3.67	2.91	3.58	3.53	3.54	Sangat Tanggap	A
103.	Kota Surakarta	3.51	3.52	2.51	3.04	3.14	3.24	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.	Kota Tegal	3.53	3.80	3.31	3.80	3.71	3.78	Sangat Tanggap	A
105.	Jawa Timur	3.49	3.61	2.86	3.39	3.41	3.31	Sangat Tanggap	A
106.	Malang	3.92	3.81	2.64	3.50	3.59	3.46	Sangat Tanggap	A
107.	Tulungagung	3.31	3.46	2.72	3.31	3.27	3.47	Sangat Tanggap	A
108.	Pasuruan	3.57	3.94	3.46	3.87	3.92	3.71	Sangat Tanggap	A
109.	Sumenep	3.59	3.81	3.55	3.76	3.88	3.73	Sangat Tanggap	A
110.	Gresik	3.64	3.71	2.97	3.56	3.42	3.54	Sangat Tanggap	A
111.	Lumajang	3.42	3.50	2.45	2.96	3.18	3.20	Tanggap	B
112.	Kediri	3.48	3.66	2.56	3.51	3.25	3.41	Sangat Tanggap	A
113.	Tuban	3.32	3.62	2.78	3.29	3.08	3.30	Sangat Tanggap	A
114.	Kota Malang	3.39	3.06	2.14	2.38	2.74	2.83	Tanggap	B
115.	Kota Surabaya	3.57	3.75	3.08	3.58	3.44	3.55	Sangat Tanggap	A
116.	Kota Kediri	3.20	3.70	3.12	3.57	3.81	3.50	Sangat Tanggap	A
117.	Sidoarjo	3.76	3.83	2.91	3.89	3.75	3.72	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Batu	3.16	3.55	2.74	3.33	3.25	3.27	Sangat Tanggap	A
119.	Trenggalek	3.96	3.75	3.33	3.78	3.63	3.75	Sangat Tanggap	A
120.	Nganjuk	3.32	3.66	3.06	3.84	3.74	3.57	Sangat Tanggap	A
121.	Kota Mojokerto	3.23	3.40	2.60	3.13	3.04	3.16	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.	Barito Kuala	3.40	3.71	2.76	3.68	3.74	3.53	Sangat Tanggap	A
141.	Kota Banjarbaru	3.86	3.89	3.53	3.85	3.80	3.82	Sangat Tanggap	A
142.	Balangan	3.62	3.75	3.31	3.66	3.82	3.66	Sangat Tanggap	A
143.	Tanah Laut	3.83	3.80	3.42	3.68	3.59	3.71	Sangat Tanggap	A
144.	Tabalong	3.37	3.32	2.48	2.96	3.21	3.14	Tanggap	B
145.	Hulu Sungai Selatan	3.33	3.35	2.40	2.73	2.74	3.00	Tanggap	B
146.	Hulu Sungai Utara	3.80	3.27	3.20	3.51	3.56	3.50	Sangat Tanggap	A
147.	Kota Banjarmasin	3.24	3.09	2.11	2.36	2.39	2.74	Tanggap	B
148.	Kalimantan Barat	3.20	3.38	2.66	2.83	2.94	3.06	Tanggap	B
149.	Bengkayang	3.16	3.29	2.56	2.66	2.71	2.94	Tanggap	B
150.	Kubu Raya	2.71	3.85	3.52	3.73	3.81	3.50	Sangat Tanggap	A
151.	Sintang	3.25	3.32	2.59	2.70	2.88	3.01	Tanggap	B
152.	Sanggau	3.11	3.34	2.56	2.74	3.07	3.01	Tanggap	B
153.	Kota Singkawang	3.25	3.44	2.67	2.90	2.92	3.10	Tanggap	B
154.	Kota Pontianak	3.28	3.14	2.23	2.40	2.68	2.83	Tanggap	B
155.	Mempawah	3.42	3.36	2.44	2.90	2.70	3.07	Tanggap	B
156.	Kalimantan Timur	3.46	3.41	2.67	2.99	2.82	3.16	Tanggap	B
157.	Samarinda	3.18	3.36	2.57	2.89	2.72	3.02	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	Balikpapan	3.89	3.59	2.92	3.41	2.93	3.45	Sangat Tanggap	A
159.	Bontang	3.33	3.45	2.70	2.88	2.83	3.11	Tanggap	B
160.	Kalimantan Tengah	3.25	3.57	2.91	3.09	3.18	3.25	Tanggap	B
161.	Kota Waringin Barat	3.40	3.93	3.58	3.83	4.00	3.75	Sangat Tanggap	A
162.	Kota Palangka Raya	3.11	3.28	2.37	2.49	2.58	2.84	Tanggap	B
163.	Kalimantan Utara	3.41	3.42	2.67	2.86	2.97	3.13	Tanggap	B
164.	Kota Tarakan	3.41	3.63	2.90	3.20	3.08	3.31	Sangat Tanggap	A
165.	Nunukan	3.40	3.21	2.44	2.53	2.85	2.96	Tanggap	B
166.	Sulawesi Selatan	3.59	3.73	2.97	3.33	3.51	3.48	Sangat Tanggap	A
167.	Tana Toraja	3.61	3.57	2.73	3.31	3.22	3.38	Sangat Tanggap	A
168.	Bone	3.60	3.83	2.98	3.05	3.73	3.48	Sangat Tanggap	A
169.	Kota Palopo	3.56	3.82	3.27	3.65	3.63	3.63	Sangat Tanggap	A
170.	Sulawesi Tengah	3.09	3.26	2.56	2.68	2.62	2.91	Tanggap	B
171.	Banggai Kepulauan	3.47	3.47	2.64	2.89	2.64	3.12	Tanggap	B
172.	Poso	3.14	3.18	2.46	2.60	2.55	2.86	Tanggap	B
173.	Tojo Una-Una	3.15	3.17	2.53	2.53	2.76	2.88	Tanggap	B
174.	Kota Palu	3.27	3.21	2.85	3.19	3.42	3.22	Tanggap	B
175.	Morowali	3.00	3.28	2.72	2.72	2.56	2.90	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176.	Donggala	2.72	3.35	2.58	2.73	2.66	2.86	Tanggap	B
177.	Sulawesi Tenggara	3.17	3.45	2.53	2.98	3.05	3.11	Tanggap	B
178.	Muna	2.90	3.44	2.74	2.97	3.07	3.06	Tanggap	B
179.	Kolaka	3.17	3.63	3.14	3.36	3.10	3.32	Sangat Tanggap	A
180.	Kota Kendari	3.02	3.02	2.11	2.15	2.80	2.68	Tanggap	B
181.	Kota Bau-Bau	3.55	3.78	2.43	3.59	3.23	3.46	Sangat Tanggap	A
182.	Gorontalo	3.26	3.40	2.58	2.70	2.67	3.00	Tanggap	B
183.	Boalemo	3.31	3.44	2.77	2.92	2.78	3.11	Tanggap	B
184.	Bone Bolango	3.13	3.44	2.63	2.80	2.81	3.03	Tanggap	B
185.	Kota Gorontalo	3.20	3.28	2.39	2.36	2.31	2.80	Tanggap	B
186.	Gorontalo Utara	3.48	3.65	3.08	3.45	3.64	3.50	Sangat Tanggap	A
187.	Gorontalo	3.24	3.36	2.26	2.50	2.45	2.87	Tanggap	B
188.	Maluku	3.28	3.44	2.66	2.71	2.68	3.03	Tanggap	B
189.	Buru Selatan	3.23	3.06	1.97	2.10	2.16	2.62	Cukup Tanggap	C
190.	Kota Tual	3.34	3.80	3.33	3.43	3.24	3.46	Sangat Tanggap	A
191.	Maluku Utara	3.28	3.33	2.31	2.41	2.33	2.83	Tanggap	B
192.	Pulau Morotai	3.30	3.25	2.47	2.69	2.34	2.91	Tanggap	B
193.	Halmahera Utara	2.90	3.39	2.36	2.57	2.65	2.85	Tanggap	B
194.	Kota Tidore	3.45	3.33	2.17	2.26	2.24	2.81	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
195.	Papua	3.10	3.10	2.37	2.50	2.69	2.82	Tanggap	B
196.	Jayapura	3.25	3.21	2.37	2.61	2.94	2.95	Tanggap	B
197.	Mimika	2.92	2.95	2.37	2.36	2.34	2.64	Cukup Tanggap	C
198.	Sulawesi Barat	3.54	3.38	2.43	2.62	2.69	3.03	Tanggap	B
199.	Poliwali Mandar	3.54	3.38	2.43	2.62	2.69	3.03	Tanggap	B
200.	Sulawesi Utara	3.25	3.39	2.59	2.78	2.82	3.04	Tanggap	B
201.	Kepulauan Sangihe	3.39	3.62	2.97	3.12	3.02	3.28	Sangat Tanggap	A
202.	Bolaang Mongondow	3.29	3.43	2.57	2.63	2.85	3.02	Tanggap	B
203.	Kota Bitung	3.10	3.21	2.35	2.75	2.90	2.93	Tanggap	B
204.	Kota Manado	3.18	3.25	2.43	2.66	2.52	2.89	Tanggap	B
205.	Papua Barat	3.43	3.91	3.71	3.71	3.80	3.70	Sangat Tanggap	A
Rata-rata Nasional		3.39	3.50	2.77	3.06	3.09	3.23	Tanggap	B



**HASIL PENGUKURAN
INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)
TAHUN 2025**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun
2025

Jakarta, 19 Desember 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

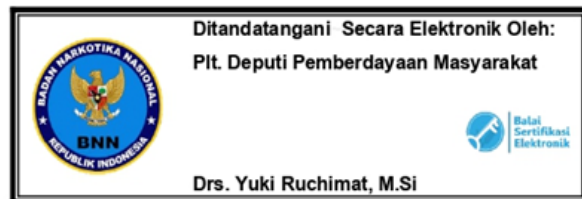
1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh BNNP dan BNNK kepada Penggiat P4GN.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya. Dari data hasil pengukuran IKP Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh BNNP dan BNNK ini hanya melaporkan 199 Satker, sedangkan 8 Satker tidak dapat melakukan pengukuran IKP karena tidak mendapatkan anggaran Peran Serta Masyarakat (PSM).
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Plt. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	0,00	0,00	3,63	3,76	3,70	Sangat Mandiri	A
2	BNNK Sabang	0,00	0,00	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
3	BNNK Pidie Jaya	3,58	3,51	0,00	0,00	3,55	Sangat Mandiri	A
4	BNNK Pidie	3,92	0,00	0,00	3,87	3,89	Sangat Mandiri	A
5	BNNK Gayo Lues	3,61	0,00	3,33	0,00	3,47	Sangat Mandiri	A
6	BNNK Bireuen	0,00	3,62	3,63	0,00	3,63	Sangat Mandiri	A
7	BNNK Banda Aceh	0,00	0,00	3,87	3,52	3,70	Sangat Mandiri	A
8	BNNK Aceh Tamiang	0,00	0,00	3,53	3,50	3,51	Sangat Mandiri	A
9	BNNK Aceh Selatan	3,41	0,00	3,28	0,00	3,35	Sangat Mandiri	A
10	BNN Kota Lhokseumawe	3,92	0,00	0,00	3,08	3,50	Sangat Mandiri	A
11	BNN Kota Langsa	0,00	0,00	3,94	3,74	3,84	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0,00	0,00	3,43	3,32	3,38	Sangat Mandiri	A
13	BNNK Solok	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	Sangat Mandiri	A
14	BNNK Sawahlunto	0,00	3,91	0,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
15	BNNK Payakumbuh	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
16	BNNK Pasaman Barat	3,84	0,00	0,00	3,87	3,85	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMATERA UTARA	0,00	0,00	3,56	3,59	3,58	Sangat Mandiri	A
18	BNNK Tebing Tinggi	0,00	0,00	3,47	3,46	3,47	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19	BNNK Tapanuli Selatan	3,73	0,00	3,75	0,00	3,74	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. Balai	0,00	0,00	3,86	3,66	3,76	Sangat Mandiri	A
21	BNNK Simalungun	3,52	0,00	0,00	3,57	3,55	Sangat Mandiri	A
22	BNNK Serdang Bedagai	0,00	0,00	3,41	3,40	3,41	Sangat Mandiri	A
23	BNNK Pematang Siantar	3,54	3,72	0,00	0,00	3,63	Sangat Mandiri	A
24	BNNK Langkat	3,67	0,00	3,69	0,00	3,68	Sangat Mandiri	A
25	BNNK Mandailing Natal	0,00	0,00	3,56	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A
26	BNNK Labuhan Batu Utara	0,00	0,00	3,59	3,53	3,56	Sangat Mandiri	A
27	BNNK Karo	0,00	0,00	3,57	3,56	3,57	Sangat Mandiri	A
28	BNNK Gunungsitoli	0,00	0,00	3,56	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A
29	BNNK Deli Serdang	0,00	0,00	3,76	3,74	3,75	Sangat Mandiri	A
30	BNNK Binjai	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	Sangat Mandiri	A
31	BNNK Batubara	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84	Sangat Mandiri	A
32	BNNK Asahan	0,00	3,51	3,52	0,00	3,52	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMATERA SELATAN	4,00	0,00	0,00	3,89	3,95	Sangat Mandiri	A
34	BNNK Prabumulih	3,93	0,00	3,91	0,00	3,92	Sangat Mandiri	A
35	BNNK Pagar Alam	0,00	0,00	3,47	3,69	3,58	Sangat Mandiri	A
36	BNNK Oku Timur	3,69	0,00	0,00	3,72	3,71	Sangat Mandiri	A
37	BNNK Ogan Komering Ilir	0,00	0,00	3,11	3,20	3,15	Mandiri	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK Ogan Ilir	0,00	0,00	3,62	3,54	3,58	Sangat Mandiri	A
39	BNNK Muara Enim	3,69	0,00	0,00	3,70	3,70	Sangat Mandiri	A
40	BNNK Lubuklinggau	0,00	0,00	3,83	3,80	3,82	Sangat Mandiri	A
41	BNNK Empat Lawang	0,00	0,00	3,65	3,54	3,60	Sangat Mandiri	A
42	BNN Kab Musi Rawas	0,00	0,00	3,68	3,30	3,49	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,48	3,47	0,00	3,60	3,54	Sangat Mandiri	A
44	BNNK Way Kanan	3,64	0,00	0,00	3,48	3,56	Sangat Mandiri	A
45	BNNK Tanggamus	3,76	3,72	0,00	0,00	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK Lampung Timur	3,80	3,16	3,60	3,60	3,70	Sangat Mandiri	A
47	BNNK Lampung Selatan	3,62	0,00	3,60	0,00	3,61	Sangat Mandiri	A
48	BNN Kota Metro	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,70	0,00	0,00	3,69	3,70	Sangat Mandiri	A
50	BNNK Pelalawan	3,76	3,83	0,00	0,00	3,79	Sangat Mandiri	A
51	BNNK Pekanbaru	0,00	0,00	3,85	3,88	3,87	Sangat Mandiri	A
52	BNNK Kuantan Singingi	0,00	0,00	3,88	3,88	3,88	Sangat Mandiri	A
53	BNN Kota Dumai	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0,00	0,00	3,36	4,00	3,68	Sangat Mandiri	A
55	BNNK Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89	Sangat Mandiri	A
56	BNNK Karimun	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
57	BNN Kota Batam	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,62	0,00	0,00	3,62	3,62	Sangat Mandiri	A
59	BNNK Tanjab Timur	3,22	0,00	0,00	3,15	3,18	Mandiri	B
60	BNN Kota Jambi	3,82	0,00	4,00	0,00	3,91	Sangat Mandiri	A
61	BNNK Batanghari	3,59	0,00	0,00	3,64	3,62	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BANGKA BELITUNG	3,39	0,00	0,00	3,41	3,40	Sangat Mandiri	A
63	BNNK Pangkalpinang	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	Sangat Mandiri	A
64	BNNK Belitung	3,72	0,00	0,00	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
65	BNNK Bangka selatan	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	Sangat Mandiri	A
66	BNNK Bangka	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	Sangat Mandiri	A
68	BNNK Bengkulu Selatan	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	Sangat Mandiri	A
69	BNNK Bengkulu	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	Sangat Mandiri	A
71	BNNK Jakarta Selatan	3,88	0,00	3,94	0,00	3,91	Sangat Mandiri	A
72	BNN Kota Jakarta Utara	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	Sangat Mandiri	A
73	BNN Kota Jakarta Timur	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	Sangat Mandiri	A
75	BNN Kota Tangerang Selatan	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
76	BNN Kota Tangerang	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	Sangat Mandiri	A
77	BNN Kota Cilegon	3,80	0,00	3,36	0,00	3,58	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	Sangat Mandiri	A
79	BNNK Sumedang	3,73	0,00	0,00	3,76	3,75	Sangat Mandiri	A
80	BNNK Sukabumi	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	Sangat Mandiri	A
81	BNNK Karawang	3,00	0,00	0,00	3,32	3,16	Mandiri	B
82	BNNK Garut	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	Sangat Mandiri	A
83	BNNK Cimahi	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A
84	BNNK Cianjur	0,00	3,68	0,00	0,00	3,68	Sangat Mandiri	A
85	BNNK Ciamis	3,59	0,00	0,00	3,92	3,75	Sangat Mandiri	A
86	BNNK Bandung Barat	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80	Sangat Mandiri	A
87	BNN Kota Tasikmalaya	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	Sangat Mandiri	A
88	BNN Kota Depok	3,32	0,00	0,00	3,46	3,39	Sangat Mandiri	A
89	BNN Kota Cirebon	3,93	3,91	0,00	0,00	3,92	Sangat Mandiri	A
90	BNN Kabupaten Bogor	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	Sangat Mandiri	A
91	BNNK Kuningan	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNP JAWA TENGAH	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	Sangat Mandiri	A
93	BNNK Temanggung	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
94	BNNK Tegal	0,00	0,00	3,56	0,00	3,56	Sangat Mandiri	A
95	BNNK Purbalingga	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	Sangat Mandiri	A
96	BNNK Magelang	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	Sangat Mandiri	A
97	BNNK Cilacap	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	Sangat Mandiri	A
98	BNNK Batang	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	Sangat Mandiri	A
99	BNNK Banyumas	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	Sangat Mandiri	A
100	BNN Kota Surakarta	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	Sangat Mandiri	A
101	BNN Kab. Kendal	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	Sangat Mandiri	A
102	BNNP JAWA TIMUR	3,71	0,00	0,00	3,90	3,81	Sangat Mandiri	A
103	BNNK Tulung Agung	3,88	0,00	0,00	3,88	3,88	Sangat Mandiri	A
104	BNNK Tuban	3,68	0,00	0,00	3,86	3,77	Sangat Mandiri	A
105	BNNK Trenggalek	3,76	0,00	3,72	0,00	3,74	Sangat Mandiri	A
106	BNNK Sumenep	0,00	0,00	3,60	3,08	3,34	Sangat Mandiri	A
107	BNNK Sidoarjo	0,00	0,00	3,97	3,79	3,88	Sangat Mandiri	A
108	BNNK Pasuruan	0,00	3,80	3,86	0,00	3,83	Sangat Mandiri	A
109	BNNK Nganjuk	3,85	0,00	3,66	0,00	3,76	Sangat Mandiri	A
110	BNNK Mojokerto	0,00	0,00	3,64	3,86	3,75	Sangat Mandiri	A
111	BNN Kab Malang	0,00	0,00	3,76	3,72	3,74	Sangat Mandiri	A
112	BNNK Lumajang	3,76	3,40	0,00	0,00	3,58	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
113	BNNKab Kediri	0,00	0,00	3,57	3,51	3,54	Sangat Mandiri	A
114	BNNK Gresik	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
115	BNNK Blitar	3,33	0,00	0,00	3,66	3,50	Sangat Mandiri	A
116	BNN Kota Surabaya	0,00	0,00	3,74	3,79	3,77	Sangat Mandiri	A
117	BNN Kota Malang	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	Sangat Mandiri	A
118	BNN Kota Kediri	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84	Sangat Mandiri	A
119	BNN Kota Batu	0,00	3,70	0,00	3,83	3,77	Sangat Mandiri	A
120	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	Sangat Mandiri	A
121	BNNK Sleman	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	Sangat Mandiri	A
122	BNNK Bantul	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	Sangat Mandiri	A
123	BNN Kota Yogyakarta	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	Sangat Mandiri	A
124	BNNP BALI	3,71	0,00	0,00	3,68	3,70	Sangat Mandiri	A
125	BNNK Karangasem	3,46	0,00	3,40	0,00	3,43	Sangat Mandiri	A
126	BNNK Gianyar	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
127	BNN Kota Denpasar	0,00	0,00	3,49	3,16	3,33	Sangat Mandiri	A
128	BNN Kabupaten Badung	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91	Sangat Mandiri	A
129	BNN Kab Buleleng	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	Sangat Mandiri	A
130	BNNP NTB	3,84	3,60	3,44	0,00	3,63	Sangat Mandiri	A
131	BNNK Sumbawa Barat	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
132	BNNK Sumbawa	3,36	0,00	0,00	3,56	3,46	Sangat Mandiri	A
133	BNNK Mataram	3,96	0,00	3,68	0,00	3,82	Sangat Mandiri	A
134	BNNK Bima	4,00	0,00	0,00	3,80	3,90	Sangat Mandiri	A
135	BNNP NTT	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	Sangat Mandiri	A
136	BNNK Kota Kupang	3,60	0,00	0,00	3,56	3,58	Sangat Mandiri	A
137	BNNK Belu	0,00	0,00	3,65	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
138	BNN Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	3,46	3,49	3,48	Sangat Mandiri	A
139	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,86	0,00	3,88	0,00	3,87	Sangat Mandiri	A
140	BNNK Sintang	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	Sangat Mandiri	A
141	BNNK Sanggau	3,83	0,00	0,00	3,87	3,85	Sangat Mandiri	A
142	BNNK Pontianak	0,00	0,00	3,74	3,88	3,81	Sangat Mandiri	A
143	BNNK Mempawah	0,00	0,00	3,60	3,67	3,64	Sangat Mandiri	A
144	BNN Kota Singkawang	3,55	0,00	0,00	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
145	BNN Kab. Kubu Raya	0,00	0,00	3,67	3,73	3,70	Sangat Mandiri	A
146	BNN Kab Bengkayang	0,00	0,00	3,83	3,81	3,82	Sangat Mandiri	A
147	BNNP KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	Sangat Mandiri	A
148	BNNK Tanah Laut	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	Sangat Mandiri	A
149	BNNK Tabalong	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
150	BNNK Hulu Sungai Utara	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	Sangat Mandiri	A
151	BNNK Hulu sungai Selatan	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	Sangat Mandiri	A
152	BNNK Barito Kuala	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
153	BNNK Banjarmasin	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	Sangat Mandiri	A
154	BNNK Banjarbaru	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	Sangat Mandiri	A
155	BNNK Balangan	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	Sangat Mandiri	A
156	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	Sangat Mandiri	A
157	BNNK Palangka Raya	0,00	0,00	3,64	3,44	3,54	Sangat Mandiri	A
158	BNNK Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
159	BNNP KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	Sangat Mandiri	A
160	BNNK Samarinda	3,68	0,00	3,72	0,00	3,70	Sangat Mandiri	A
161	BNNK Balikpapan	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	Sangat Mandiri	A
162	BNN Kota Bontang	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	Sangat Mandiri	A
163	BNNP KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	3,62	3,69	3,66	Sangat Mandiri	A
164	BNNK Tarakan	0,00	0,00	3,17	3,63	3,40	Sangat Mandiri	A
165	BNNK Nunukan	3,38	0,00	3,41	0,00	3,40	Sangat Mandiri	A
166	BNNP SULAWESI BARAT	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	Sangat Mandiri	A
167	BNNP SULAWESI TENGGARA	2,82	0,00	0,00	2,86	2,84	Mandiri	B

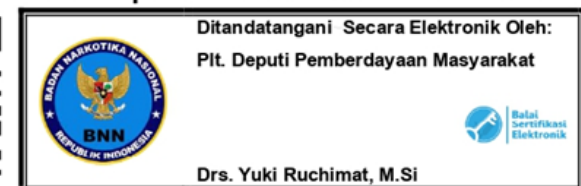
LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
 TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
168	BNNK Bau Bau	3,90	0,00	0,00	3,93	3,92	Sangat Mandiri	A
169	BNN Kota Kendari	3,81	0,00	0,00	3,69	3,75	Sangat Mandiri	A
170	BNNK Muna	3,83	0,00	3,82	0,00	3,83	Sangat Mandiri	A
171	BNNP SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	3,48	2,99	3,24	Mandiri	B
172	BNN Kota Palopo	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	Sangat Mandiri	A
173	BNNK Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
174	BNNK Bone	3,67	0,00	3,57	0,00	3,62	Sangat Mandiri	A
175	BNNP SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14	Mandiri	B
176	BNNK Donggala	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
177	BNNK Banggai Kep	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77	Sangat Mandiri	A
178	BNN KAB Tojo Una-Una	3,41	0,00	0,00	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
179	BNN Kab Poso	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	Sangat Mandiri	A
180	BNN KAB Morowali	0,00	0,00	2,64	3,92	3,28	Sangat Mandiri	A
181	BNNP SULAWESI UTARA	3,68	0,00	0,00	3,37	3,53	Sangat Mandiri	A
182	BNNK Bolaang Mongondow	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	Sangat Mandiri	A
183	BNN Kota Bitung	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	Sangat Mandiri	A
184	BNN Kota Manado	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Sangat Mandiri	A
185	BNNK Kepulauan Sangihe	3,42	0,00	0,00	3,41	3,42	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
186	BNNP GORONTALO	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	Sangat Mandiri	A
187	BNNK Bone Bolango	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Sangat Mandiri	A
188	BNN Kab Gorontalo	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77	Sangat Mandiri	A
189	BNNK Gorontalo Utara	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	Sangat Mandiri	A
190	BNNK Boalemo	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	Sangat Mandiri	A
191	BNNP MALUKU	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	Sangat Mandiri	A
192	BNNK Tual	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51	Sangat Mandiri	A
193	BNNP MALUKU UTARA	3,76	0,00	3,84	0,00	3,80	Sangat Mandiri	A
194	BNNK Pulau Morotai	0,00	0,00	3,56	3,36	3,46	Sangat Mandiri	A
195	BNNK Halmahera Utara	0,00	0,00	3,84	3,38	3,61	Sangat Mandiri	A
196	BNNP PAPUA	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	Sangat Mandiri	A
197	BNNK Mimika	3,46	0,00	0,00	3,28	3,37	Sangat Mandiri	A
198	BNNK Jayapura	0,00	3,33	0,00	3,65	3,49	Sangat Mandiri	A
199	BNNP PAPUA BARAT	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	Sangat Mandiri	A
Total						3,66	Sangat Mandiri	A

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional





**HASIL PENGUKURAN
INDEKS KAWASAN RAWAN NARKOBA (IKRN)
TAHUN 2025**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kawasan
Rawan Narkoba (IKRN) Tahun 2025

Jakarta, 23 Desember 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kab/Kota

di
Tempat

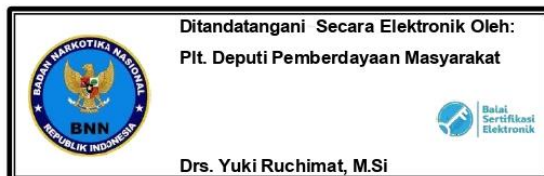
1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) melalui jajarannya PJ Dayamas BNNP dan BNNK dengan metode survey berbasis web yang dilaksanakan pada 300 Desa/Kelurahan di 34 Provinsi di Indonesia.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKRN tahun 2025 sebagaimana terlampir. Perlu diinformasikan bahwa wilayah yang tidak diukur ulang pada Bulan November-Desember 2025 masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2024.

4. Berkaitan dengan poin 3 (tiga) diatas, maka BNNP dan BNNK agar melakukan tindak lanjut intervensi pada kawasan yang angka indeks 2025 lebih tinggi dari pada angka indeks 2024 sesuai rekomendasi tabel berikut:

Indeks 2024	Status Kerawanan	Indeks 2025	Status Kerawanan	Status Keterpulihan	Rekomendasi
1,00-1,20	Bahaya	1,21-1,40	Bahaya	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,21-1,40	Bahaya	1,41-1,60	Bahaya	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,41-1,60	Bahaya	1,61-1,77	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,61-1,77	Waspada	1,78-1,94	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,78-1,94	Waspada	1,95-2,10	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,95-2,10	Waspada	2,11-3,50	Siaga/Aman	Pulih	Cukup/Pindah Lokasi

5. Bagi kawasan yang indeks 2025 tetap atau lebih kecil dari indeks 2024 maka BNNP dan BNNK harus melanjutkan intervensi dengan meningkatkan pola pembinaan masyarakat, dan bersinergi dengan *stakeholder* yang lebih intensif.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Plt. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KAWASAN RAWAN NARKOBA TAHUN 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
1	Durian Kawan	Kluet Timur	Kab. Aceh Selatan	Aceh	1,52	Bahaya
2	Paya Dapur	Kluet Timur	Kab. Aceh Selatan	Aceh	1,41	Bahaya
3	Leungah	Seulimeum	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,85	Waspada
4	Lampisang Dayah	Seulimeum	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,00	Bahaya
5	Le Seum	Mesjid Raya	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,22	Bahaya
6	Luthu Dayah Krueng	Sukamakmur	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,85	Waspada
7	Luthu Lamweu	Sukamakmur	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,89	Waspada
8	Teupin Rusep	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,76	Waspada
9	Salah Sirong Jaya	Jeumpa	Kab. Bireuen	Aceh	1,81	Waspada
10	Tampeng Musara	Kutapanjang	Kab. Gayo Lues	Aceh	1,95	Waspada
11	Kutebukit	Blangpegayon	Kab. Gayo Lues	Aceh	1,71	Waspada
12	Kota Blangkejeren	Blangkejeren	Kab. Gayo Lues	Aceh	2,22	Siaga
13	Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	Aceh	2,26	Siaga
14	Alue Dua	Langsa Baro	Kota Langsa	Aceh	2,19	Siaga
15	Lambaro Biluy	Darul Kamal	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,25	Bahaya
16	Geulanggang Gampong	Kota Juang	Kab. Bireuen	Aceh	1,90	Waspada
17	Blang Banyak	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,85	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
18	Jurong	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,92	Waspada
19	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	2,01	Waspada
20	Sunggal Kanan	Sunggal	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	1,80	Waspada
21	Rahunig	Rahunig	Kab. Asahan	Sumatera Utara	1,59	Bahaya
22	Huta Bangun	Panyabungan Timur	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	1,53	Bahaya
23	Huta Tinggi	Panyabungan Timur	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	1,85	Waspada
24	Londut	Kualuh Hulu	Kab. Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	2,10	Waspada
25	Lalang	Medan Sunggal	Kota Medan	Sumatera Utara	1,83	Waspada
26	Tanjung Gusta	Medan Helvetia	Kota Medan	Sumatera Utara	2,04	Waspada
27	Sidorejo	Medan Tembung	Kota Medan	Sumatera Utara	1,97	Waspada
28	Aur	Medan Maimun	Kota Medan	Sumatera Utara	2,03	Waspada
29	Pantai Burung	Tanjung Balai Selatan	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	2,09	Waspada
30	Pantai Johor	Datuk Bandar	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	2,11	Siaga
31	Tebing	Tebing	Kab. Karimun	Kep. Riau	2,06	Waspada
32	Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam	Kep. Riau	1,95	Waspada
33	Tanjung Uma	Lubuk Baja	Kota Batam	Kep. Riau	1,96	Waspada
34	Muka Kuning	Sei Beduk	Kota Batam	Kep. Riau	2,02	Waspada
35	Bengkong Laut	Bengkong	Kota Batam	Kep. Riau	1,80	Waspada
36	Dompak	Bukit Bestari	Kota Tanjung Pinang	Kep. Riau	1,99	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
37	Tanah Datar	Pekanbaru Kota	Kota Pekanbaru	Riau	2,06	Waspada
38	Kampung Dalam	Senapelan	Kota Pekanbaru	Riau	2,11	Siaga
39	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan	Kota Dumai	Riau	1,85	Waspada
40	Pelintung	Medang Kampai	Kota Dumai	Riau	1,72	Waspada
41	Laksamana	Dumai Kota	Kota Dumai	Riau	1,75	Waspada
42	Koto Gadang Koto Anau	Lembang Jaya	Kab. Solok	Sumatera Barat	1,90	Waspada
43	Muaro Paneh	Bukit Sundi	Kab. Solok	Sumatera Barat	1,87	Waspada
44	Kampung Pondok	Padang Barat	Kota Padang	Sumatera Barat	1,86	Waspada
45	Gates Nan XX	Lubuk Begalung	Kota Padang	Sumatera Barat	2,25	Siaga
46	Tulung Selapan Ilir	Tulung Selapan	Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	2,49	Siaga
47	Air Itam	Penukal	Kab. Penukal Abab Lematangilir	Sumatera Selatan	1,86	Waspada
48	Rangai Tri Tunggal	Katibung	Kab. Lampung Selatan	Lampung	1,97	Waspada
49	Titiwangi	Candipuro	Kab. Lampung Selatan	Lampung	2,19	Siaga
50	Suka Jawa	Bumi Ratu Nuban	Kab. Lampung Tengah	Lampung	1,96	Waspada
51	Kutadalom	Gisting	Kab. Tanggamus	Lampung	1,86	Waspada
52	Braja Gemilang	Braja Selehah	Kab. Lampung Timur	Lampung	2,02	Waspada
53	Tiuh Balak Pasar	Baradatu	Kab. Way Kanan	Lampung	2,03	Waspada
54	Keteguhan	Telukbetung Timur	Kota Bandar Lampung	Lampung	1,85	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
55	Karangrejo	Metro Utara	Kota Metro	Lampung	2,12	Siaga
56	Muara Bulian	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,92	Waspada
57	Teratai	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,86	Waspada
58	Pasar Baru	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	2,09	Waspada
59	Rengas Condong	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,98	Waspada
60	Bajubang	Bajubang	Kab. Batanghari	Jambi	1,83	Waspada
61	Mekar Sari Nes	Bajubang	Kab. Batanghari	Jambi	2,19	Siaga
62	Pematang Gajah	Jambi Luar Kota	Kab. Muaro Jambi	Jambi	1,77	Waspada
63	Kasang Pudak	Kumpeh Ulu	Kab. Muaro Jambi	Jambi	1,78	Waspada
64	Talang Belido	Sungai Gelam	Kab. Muaro Jambi	Jambi	2,18	Siaga
65	Sido Mukti	Dendang	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	2,49	Siaga
66	Catur Rahayu	Dendang	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	1,78	Waspada
67	Jelmu	Pelayangan	Kota Jambi	Jambi	1,94	Waspada
68	Ulu Gedong	Danau Teluk	Kota Jambi	Jambi	2,09	Waspada
69	Rawa Sari	Alam Barajo	Kota Jambi	Jambi	2,18	Siaga
70	Legok	Danau Sipin	Kota Jambi	Jambi	1,97	Waspada
71	Sri Menanti	Sungailiat	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,94	Waspada
72	Air Ruai	Pemali	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,73	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
73	Karya Makmur	Pemali	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,64	Waspada
74	Dukong	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,73	Waspada
75	Aik Ketekok	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,61	Waspada
76	Tanjong Tinggi	Sijuk	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,62	Waspada
77	Toboali	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	2,12	Siaga
78	Teladan	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	1,72	Waspada
79	Tanjungketapang	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	1,70	Waspada
80	Beluluk	Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	1,69	Waspada
81	Batu Belubang	Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	1,54	Bahaya
82	Sungai Selan Atas	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	2,11	Siaga
83	Lontong Pancur	Pangkal Balam	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1,83	Waspada
84	Parit Lalang	Rangkui	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	2,03	Waspada
85	Gabek Satu	Gabek	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1,71	Waspada
86	Sido Luhur	Sukaraja	Kab. Seluma	Bengkulu	1,84	Waspada
87	Betungan	Selebar	Kota Bengkulu	Bengkulu	2,12	Siaga
88	Malabero	Teluk Segara	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,76	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
89	Anggut Dalam	Ratu Samban	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,86	Waspada
90	Tanjung Agung	Sungai Serut	Kota Bengkulu	Bengkulu	2,03	Waspada
91	Timur Indah	Singaran Pati	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,76	Waspada
92	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Kota Adm. Jakarta Barat	DKI Jakarta	2,00	Waspada
93	Kota Bambu Selatan	Pal Merah	Kota Adm. Jakarta Barat	DKI Jakarta	1,82	Waspada
94	Cilandak Barat	Cilandak	Kota Adm. Jakarta Selatan	DKI Jakarta	2,16	Siaga
95	Bintaro	Pesanggrahan	Kota Adm. Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1,93	Waspada
96	Makasar	Makasar	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	1,73	Waspada
97	Kelapa Dua Wetan	Ciracas	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	2,13	Siaga
98	Susukan	Ciracas	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	1,93	Waspada
99	Tanjung Priok	Tanjung Priok	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI Jakarta	2,07	Waspada
100	Kamal Muara	Penjaringan	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI Jakarta	2,09	Waspada
101	Pasar Kemis	Pasar Kemis	Kab. Tangerang	Banten	1,82	Waspada
102	Cisauk	Cisauk	Kab. Tangerang	Banten	1,75	Waspada
103	Ranjeng	Ciruas	Kab. Serang	Banten	1,97	Waspada
104	Talaga	Mancak	Kab. Serang	Banten	1,81	Waspada
105	Periuk	Periuk	Kota Tangerang	Banten	1,96	Waspada
106	Uwung Jaya	Cibodas	Kota Tangerang	Banten	2,10	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
107	Mekarsari	Pulomerak	Kota Cilegon	Banten	1,80	Waspada
108	Cipare	Serang	Kota Serang	Banten	2,09	Waspada
109	Sumur Pecung	Serang	Kota Serang	Banten	2,03	Waspada
110	Kaligandu	Serang	Kota Serang	Banten	1,89	Waspada
111	Kagungan	Serang	Kota Serang	Banten	1,90	Waspada
112	Banten	Kasemen	Kota Serang	Banten	2,29	Siaga
113	Kapuren	Walantaka	Kota Serang	Banten	1,72	Waspada
114	Banjarsari	Cipocok Jaya	Kota Serang	Banten	1,77	Waspada
115	Pondok Aren	Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan	Banten	2,16	Siaga
116	Bumijo	Jetis	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,25	Siaga
117	Gowongan	Jetis	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1,79	Waspada
118	Bausasran	Danurejan	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1,92	Waspada
119	Jabonmekar	Parung	Kab. Bogor	Jawa Barat	2,04	Waspada
120	Ujunggenteng	Ciracap	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	1,83	Waspada
121	Pakuwon	Garut Kota	Kab. Garut	Jawa Barat	2,09	Waspada
122	Haurgeulis	Haurgeulis	Kab. Indramayu	Jawa Barat	1,97	Waspada
123	Patimban	Pusakanagara	Kab. Subang	Jawa Barat	2,18	Siaga
124	Pasirjaya	Cilamaya Kulon	Kab. Karawang	Jawa Barat	2,16	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
125	Batukaras	Cijulang	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	1,73	Waspada
126	Kebon Gedang	Batununggal	Kota Bandung	Jawa Barat	1,76	Waspada
127	Babakan Surabaya	Kiaracondong	Kota Bandung	Jawa Barat	2,13	Siaga
128	Tanah Baru	Beji	Kota Depok	Jawa Barat	2,16	Siaga
129	Cimahi	Cimahi Tengah	Kota Cimahi	Jawa Barat	1,88	Waspada
130	Adiraja	Adipala	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	2,22	Siaga
131	Karangkemiri	Jeruklegi	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	2,20	Siaga
132	Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta	Jawa Tengah	1,89	Waspada
133	Tanjung Mas	Semarang Utara	Kota Semarang	Jawa Tengah	2,04	Waspada
134	Kaligawe	Gayamsari	Kota Semarang	Jawa Tengah	1,96	Waspada
135	Purwoyoso	Ngaliyan	Kota Semarang	Jawa Tengah	1,93	Waspada
136	Malasan	Durenan	Kab. Trenggalek	Jawa Timur	2,00	Waspada
137	Rejoagung	Kedungwaru	Kab. Tulungagung	Jawa Timur	1,75	Waspada
138	Kuningan	Kanigoro	Kab. Blitar	Jawa Timur	1,78	Waspada
139	Baye	Kayen Kidul	Kab. Kediri	Jawa Timur	1,94	Waspada
140	Kemiri	Kepanjen	Kab. Malang	Jawa Timur	2,11	Siaga
141	Rowokangkung	Rowokangkung	Kab. Lumajang	Jawa Timur	2,12	Siaga
142	Wonosunyo	Gempol	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,80	Waspada
143	Kersikan	Bangil	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,63	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
144	Mojoparon	Rembang	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,83	Waspada
145	Tebel	Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	2,06	Waspada
146	Margopatut	Sawahan	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	1,86	Waspada
147	Kauman	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur	2,01	Waspada
148	Tegalagung	Semanding	Kab. Tuban	Jawa Timur	2,05	Waspada
149	Banjarsari	Cerme	Kab. Gresik	Jawa Timur	1,85	Waspada
150	Pandan	Galis	Kab. Pamekasan	Jawa Timur	1,90	Waspada
151	Pangbatok	Proppo	Kab. Pamekasan	Jawa Timur	2,16	Siaga
152	Tanjung	Saronggi	Kab. Sumenep	Jawa Timur	1,92	Waspada
153	Saronggi	Saronggi	Kab. Sumenep	Jawa Timur	1,97	Waspada
154	Mrican	Mojoroto	Kota Kediri	Jawa Timur	1,93	Waspada
155	Ketawanggede	Lowokwaru	Kota Malang	Jawa Timur	1,90	Waspada
156	Mentikan	Prajuritkulon	Kota Mojokerto	Jawa Timur	1,82	Waspada
157	Balongsari	Tandes	Kota Surabaya	Jawa Timur	2,18	Siaga
158	Sidotopo	Semampir	Kota Surabaya	Jawa Timur	2,31	Siaga
159	Ngaglik	Batu	Kota Batu	Jawa Timur	2,10	Siaga
160	Bulukerto	Bumiaji	Kota Batu	Jawa Timur	2,25	Siaga
161	Balai Karangan	Sekayam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,76	Waspada
162	Bungkang	Sekayam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,88	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
163	Entikong	Entikong	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,63	Waspada
164	Sungai Deras	Teluk Pakedai	Kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat	2,18	Siaga
165	Dalambugis	Pontianak Timur	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2,05	Waspada
166	Batulayang	Pontianak Utara	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1,50	Bahaya
167	Kertak Hanyar I	Kertak Hanyar	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	1,71	Waspada
168	Gambah Luar Muka	Kandangan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	2,11	Siaga
169	Kuripan	Banjarmasin Timur	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,56	Bahaya
170	Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,65	Waspada
171	Telaga Biru	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,76	Waspada
172	Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,72	Waspada
173	Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,63	Waspada
174	Candi	Kumai	Kab. Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	2,05	Waspada
175	Tumbang Tariak	Kurun	Kab. Gunung Mas	Kalimantan Tengah	1,90	Waspada
176	Tumbang Nusa	Jabiren	Kab. Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	1,66	Waspada
177	Pahandut	Pahandut	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	2,15	Siaga
178	Sei Gohong	Bukit Batu	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	2,03	Waspada
179	Bereng Bengkel	Sabangau	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	1,78	Waspada
180	Baru Tengah	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	2,10	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
181	Tenun Samarinda	Samarinda Seberang	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,98	Waspada
182	Pelita	Samarinda Ilir	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,96	Waspada
183	Sungai Pinang Dalam	Sungai Pinang	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,87	Waspada
184	Lok Tuan	Bontang Utara	Kota Bontang	Kalimantan Timur	2,09	Waspada
185	Baru Ilir	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	2,13	Siaga
186	Tideng Pale Timur	Sesayap	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
187	Sambungan Selatan	Tana Lia	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
188	Bebakung	Betayau	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
189	Kapuak	Muruk Rian	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
190	Karang Anyar	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,91	Waspada
191	Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,86	Waspada
192	Karang Anyar Pantai	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,02	Waspada
193	Sebengkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,12	Siaga
194	Selumit Pantai	Tarakan Tengah	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,08	Waspada
195	Lingkas Ujung	Tarakan Timur	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,57	Bahaya
196	Juata Laut	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,70	Waspada
197	Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,93	Waspada
198	Juata Kerikil	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,70	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
199	Bambu	Mamuju	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1,90	Waspada
200	Karema	Mamuju	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	2,12	Siaga
201	Simboro	Simboro dan KEP.	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1,88	Waspada
202	Tinambung	Tinambung	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,60	Waspada
203	Karama	Tinambung	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,91	Waspada
204	Sidodadi	Wonomulyo	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,76	Waspada
205	Ugibaru	Mapilli	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,75	Waspada
206	Tamanggalle	Balanipa	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,77	Waspada
207	Jenetaesa	Simbang	Kab. Maros	Sulawesi Selatan	2,14	Siaga
208	Batusura'	Rembon	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	2,15	Siaga
209	Rembon	Rembon	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	1,97	Waspada
210	Pondingao'	Masanda	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	1,81	Waspada
211	Bara Baraya	Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,82	Waspada
212	Maccini Gusung	Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,93	Waspada
213	Rappokalling	Tallo	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,83	Waspada
214	Lembo	Tallo	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,99	Waspada
215	Paropo	Panakkukang	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,93	Waspada
216	Tanjung Merdeka	Tamalate	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,66	Waspada
217	Pattene	Wara Utara	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	1,83	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
218	Salotellue	Wara Timur	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	2,11	Siaga
219	Koburu	Bungku Selatan	Kab. Morowali	Sulawesi Tengah	1,66	Waspada
220	Mpanau	Sigi Biromaru	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	1,80	Waspada
221	Kotarindau	Dolo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	1,73	Waspada
222	Uepakatu	Mamosalato	Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	1,57	Bahaya
223	Kayumalue Ngapa	Palu Utara	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,89	Waspada
224	Kayumalue Pajeko	Palu Utara	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,70	Waspada
225	Kawatuna	Mantikulore	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,83	Waspada
226	Ulu Wolo	Wolo	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara	1,80	Waspada
227	Bumi Laperu	Kulisusu Barat	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	1,66	Waspada
228	Lanosangia	Kulisusu Utara	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	1,25	Bahaya
229	Langaro Bajo	Wawonii Barat	Kab. Konawe Kep.	Sulawesi Tenggara	1,73	Waspada
230	Lebo	Wawonii Timur	Kab. Konawe Kep.	Sulawesi Tenggara	1,52	Bahaya
231	Gunung Jati	Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,07	Waspada
232	Kampung Salo	Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,01	Waspada
233	Nambo	Nambo	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,16	Siaga
234	Ayong	Sang Tombolang	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,46	Bahaya
235	Buntalo Timur	Lolak	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,56	Bahaya
236	Otam	Passi Barat	Kab. Bolaang	Sulawesi Utara	2,16	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
			Mongondow			
237	Otam Barat	Passi Barat	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	2,30	Siaga
238	Poopo Selatan	Passi Timur	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,64	Waspada
239	Pusian Selatan	Dumoga	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,59	Bahaya
240	Konarom	Dumoga Tenggara	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,79	Waspada
241	Sindulang Satu	Tuminiting	Kota Manado	Sulawesi Utara	1,85	Waspada
242	Kombos Timur	Singkil	Kota Manado	Sulawesi Utara	1,30	Bahaya
243	Dutulanaa	Limboto	Kab. Gorontalo	Gorontalo	2,01	Waspada
244	Pauwo	Kabila	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	1,58	Bahaya
245	Tulabolo	Suwawa Timur	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	1,63	Waspada
246	Ilangata	Anggrek	Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	1,78	Waspada
247	Biawu	Kota Selatan	Kota Gorontalo	Gorontalo	2,11	Siaga
248	Limba B	Kota Selatan	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,82	Waspada
249	Pohe	Hulonthalangi	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,77	Waspada
250	Siendeng	Hulonthalangi	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,91	Waspada
251	Tuban	Kuta	Kab. Badung	Bali	2,09	Waspada
252	Kuta	Kuta	Kab. Badung	Bali	1,88	Waspada
253	Dalung	Kuta Utara	Kab. Badung	Bali	1,82	Waspada

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
254	Semarapura Kelod	Klungkung	Kab. Klungkung	Bali	1,99	Waspada
255	Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar	Bali	2,03	Waspada
256	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar	Bali	1,90	Waspada
257	Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar	Bali	2,15	Siaga
258	Beleka	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	1,76	Waspada
259	Lekong	Alas Barat	Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	1,99	Waspada
260	Tumpu	Bolo	Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	1,77	Waspada
261	Banjar	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1,81	Waspada
262	Benete	Maluk	Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1,88	Waspada
263	Abian Tubuh Baru	Sandubaya	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	2,13	Siaga
264	Mandalika	Sandubaya	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	2,14	Siaga
265	Silawan	Tasifeto Timur	Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	1,88	Waspada
266	Oesapa	Kelapa Lima	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1,90	Waspada
267	Fatululi	Oebobo	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	2,11	Siaga
268	Tuak Daun Merah	Oebobo	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1,54	Bahaya
269	Tehoru	Tehoru	Kab. Maluku Tengah	Maluku	1,78	Waspada

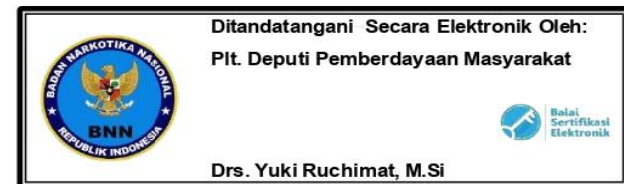
LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
270	Langgur	Kei Kecil	Kab. Maluku Tenggara	Maluku	1,68	Waspada
271	Namlea	Namlea	Kab. Buru	Maluku	1,81	Waspada
272	Hualoy	Amalatu	Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	1,72	Waspada
273	Fatmite	Namrole	Kab. Buru Selatan	Maluku	1,72	Waspada
274	Kamlanglale	Namrole	Kab. Buru Selatan	Maluku	1,63	Waspada
275	Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon	Maluku	2,09	Waspada
276	Galala	Sirimau	Kota Ambon	Maluku	1,94	Waspada
277	Batu Merah	Sirimau	Kota Ambon	Maluku	1,94	Waspada
278	Tihu	Teluk Ambon	Kota Ambon	Maluku	1,74	Waspada
279	Taar	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual	Maluku	1,85	Waspada
280	Soa-Sio	Galela	Kab. Halmahera Utara	Maluku Utara	2,05	Waspada
281	Kalumata	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,94	Waspada
282	Jati	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,94	Waspada
283	Tabona	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,95	Waspada
284	Salero	Kota Ternate Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	1,83	Waspada
285	Marikurubu	Kota Ternate Tengah	Kota Ternate	Maluku Utara	1,64	Waspada
286	Gamtufkange	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,04	Waspada
287	Indonesiana	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,96	Waspada

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
288	Tomagoba	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,95	Waspada
289	Tuguwaji	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,17	Siaga
290	Gurabati	Tidore Selatan	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,03	Waspada
291	Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,70	Waspada
292	Manokwari Barat	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,60	Bahaya
293	Sanggeng	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,25	Bahaya
294	Wosi	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,76	Waspada
295	Amban	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,47	Bahaya
296	Padarni	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	2,02	Waspada
297	Sowi	Manokwari Selatan	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,92	Waspada
298	Nendali	Sentani Timur	Kab. Jayapura	Papua	1,74	Waspada
299	Kadun Jaya	Wania	Kab. Mimika	Papua	1,73	Waspada
300	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua	2,18	Siaga
301	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua	1,86	Waspada

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





PERUBAHAN KAWASAN NARKOBA

PERUBAHAN STATUS KAWASAN RAWAN NARKOBA

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
1	Gampong Leungah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar	Aceh	BNNP Aceh	1,41	Bahaya	1,85	Waspada	Pulih
2	Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe		BNNP Aceh	1,00	Bahaya	2.26	Siaga	Pulih
3	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar		Direktorat Dayatif	1,00	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
4	Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues		BNNK Gayo Lues	2,00	Waspada	2.22	Siaga	Pulih
5	Desa Durian Kawan Kec Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan		BNNK Aceh Selatan	1.21	Bahaya	1.52	Bahaya	Pulih
6	Gampong alue dua kec langsa baro kota langsa		BNNK Langsa	1.00	Bahaya	2.19	Siaga	Pulih
7	Desa Blang Banyak Kec. Sawang Kab Aceh Utara		BNNK Lhokseumawe	1,41	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
8	Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara		BNNK Lhokseumawe	1,41	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
9	Desa Jurong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara		Direktorat Dayatif	1,41	Bahaya	1.92	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
10	Desa Salah Sironng Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen		BNNK Bireuen	1,41	Bahaya	1.81	Waspada	Pulih
11	Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab Bireuen		BNNK Bireuen	-	-	1.90	Waspada	Belum Terukur
12	Desa sidorejo, kecamatan medan tembung, Kota Medan	Sumut	BNNP Sumut	1,00	Bahaya	1.97	Waspada	Pulih
13	Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar kota tanjungbalai		BNNK Tanjung balai	1.93	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
14	Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang		BNNK Deli Serdang	1.00	Bahaya	1.80	Waspada	Pulih
15	Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara		BNNK Labuanbatu Utara	1.41	Bahaya	2.10	Waspada	Pulih
16	Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal		BNNK Mandailing Natal	1.21	Bahaya	1.53	Bahaya	Pulih
17	Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina		Direktorat Dayatif	1,21	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
18	Kel muka kuning, Kec sei beduk, Kota Batam	Kepri	BNNP Kepri	1.00	Bahaya	2.02	Waspada	Pulih
19	Kelurahan Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam		Direktorat Dayatif	1.61	Waspada	1.96	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
20	Kelurahan Kampung dalam, Kecamatan senapelan Kota Pekanbaru	Riau	BNNP Riau	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih
21	Kel. Tanah Datar, Kec. Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru Riau		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.06	Waspada	Pulih
22	Kantor Desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten Oki	Sumsel	BNNP Sumsel	1.00	Bahaya	2.49	Siaga	Pulih
23	Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	1.86	Waspada	Pulih
24	Kel. Gates Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang	Sumbar	BNNP Sumbar	1.00	Bahaya	2.25	Siaga	Pulih
25	Nagari Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok		BNNK Solok	1.00	Bahaya	1.90	Waspada	Pulih
26	Balai Desa Suka Jawa Kec, Bumi Ratu Tuban Kab. Lampung Tengah	Lampung	BNNP Lampung	1.00	Bahaya	1.96	Waspada	Pulih
27	Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan		BNNK Lampung Selatan	2.10	Waspada	2,19	Siaga	Pulih
28	Desa Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi	Jambi	BNNP Jambi	2.05	Waspada	2.18	Siaga	Pulih
29	Desa Mekar Sari NES, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari		BNNK Batang Hari	1.91	Waspada	2.19	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
30	desa sungai selan atas dan kel sungai selan, kec Sungai selan, bangka tengah	Babel	BNNP Babel	1.95	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
31	Kelurahan Tanjungketapang, Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan		BNNK Bangka Selatan	1.00	Bahaya	1.70	Waspada	Pulih
32	Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu	Bengkulu	BNNP BENGKULU	1.64	Waspada	1.76	Waspada	Belum Pulih
33	Balai Kelurahan Tanjung Agung, Kec. Sungai Seruit, Kota Bengkulu		BNN KOTA BENGKULU	2.02	Waspada	2.03	Waspada	Belum Pulih
34	Kelurahan Kota bambu selatan , kec palmerah , jakarta barat	DKI Jakarta	BNNP DKI	1.00	Bahaya	1.82	Waspada	Pulih
35	Kelurahan Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara		BNNK Jakarta Utara	1.00	Bahaya	2.07	Waspada	Pulih
36	Kelurahan Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota, Jakarta Selatan		BNNK Jakarta Selatan	2.04	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
37	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur		BNNK Jakarta Timur	1,85	Waspada	2.13	Siaga	Pulih
38	RPTRA Kampung Rawa Indah Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru		Direktorat Dayatif	2.84	Aman			Belum Terukur
39	Komplek Permata, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.00	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
40	Kel Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.07	Waspada	Pulih
41	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	Banten	BNNP Banten	1.00	Bahaya	1.80	Waspada	Pulih
42	Desa Talaga Kec. Mancak, Serang, Banten		BNNP Banten	2.09	Waspada	1.81	Waspada	Belum Pulih
43	Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak (Baduy Luar)		BNNP Banten	2.13	Siaga			Belum Terukur
44	Kel Periuk, Periuk, KOTA TANGERANG		BNNK Tangerang	1.00	Bahaya			Belum Terukur
45	Desa Ujung Genteng Kec. Ciracap Kab Sukabumi	Jabar	BNNP Jawa Barat	1.00	Bahaya	1.83	Waspada	Pulih
46	Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok		BNNK Depok	2.05	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
47	Kel Babakan Surabaya, Kec Kiara Codong, Kota Bandung		BNNK Bandung	2.05	Waspada	2.13	Siaga	Pulih
48	Desa Haurgeulis, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu		BNNK Cirebon	1.00	Bahaya	1.97	Waspada	Pulih
49	Desa Pasir Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang		BNNK Karawang	1.00	Bahaya	2.16	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
50	Desa Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor		BNNK Bogor	1.00	Bahaya	2.04	Waspada	Pulih
51	Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang,	Jateng	BNNP Jawa Tengah	1.00	Bahaya	1.93	Waspada	Pulih
52	kel. kaligawe kec gayamsari kota semarang		BNNP Jawa Tengah	2.23	Siaga	1.96	Waspada	Belum Pulih
53	Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2,04	Waspada	Pulih
54	Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta		BNNK Surakarta	1.00	Bahaya	1.89	Waspada	Pulih
55	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi, Cilacap		BNNK cilacap	2.05	Waspada	2.20	Siaga	Pulih
56	Desa Adiraja Kecamatan Adipala, Cilacap		BNNK Cilacap	2.06	Waspada	2.22	Siaga	Pulih
57	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	DIY	BNNP DIY	1.00	Bahaya	2,25	Siaga	Pulih
58	Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta		BNNK Yogyakarta	1.00	Bahaya	1,91	Waspada	Pulih
59	Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya	Jatim	BNNP Jatim	1.93	Waspada	2.18	Siaga	Pulih
60	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu		BNN Kota Batu	1.00	Bahaya	2.25	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
61	Kelurahan/Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang		BNNK Lumajang	2.09	Waspada	2.12	Siaga	Pulih
62	Desa Tegalagung Kecamatan Semanding		BNNK Tuban	2.09	Waspada	2.05	Waspada	Belum Pulih
63	Kelurahan Dalam bugis, kecamatan pontianak timur kota pontianak	Kalbar	BNNP Kalbar	1.00	Bahaya	2.05	Waspada	Pulih
64	Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kab Sanggau		BNNK Sanggau	1.41	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
65	Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau		Direktorat Dayatif	1.41	Bahaya	1.63	Waspada	Pulih
66	Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya	Kalteng	BNNP Kalimantan Tengah	1.96	Waspada	2.03	Waspada	Belum Pulih
67	Kelurahan Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat		BNNP Kalimantan Tengah	1.00	Bahaya	2.05	Waspada	Pulih
68	Aula kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya		BNNK Palangka Raya (Kalteng)	1.00	Bahaya	2.15	Siaga	Pulih
69	Kelurahan Kelayan Luar , Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kalsel	BNNP Kalimantan Selatan	1.00	Bahaya	1.63	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
70	Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan		BNNK Hulu Sungai Selatan	2.05	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
71	Kelurahan tenun, Kec samarinda sebrang, Kota Samarinda	Kaltim	BNNP Kaltim	1.00	Bahaya	1.98	Waspada	Pulih
72	Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang		BNNK Bontang	1.00	Bahaya	2.09	Waspada	Pulih
73	Kelurahan Juata Permai, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Prov. Kaltara	Kaltara	BNNP Kalimantan Utara	1.21	Bahaya	1.93	Waspada	Pulih
74	kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, Prov. Kalimantan Utara		BNNK Tarakan (Kaltara)	1.21	Bahaya	1.91	Waspada	Pulih
75	Kel Karangrejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan		Direktorat Dayatif	1.21	Bahaya	1.86	Waspada	Pulih
76	Kelurahan Sindulang Satu, Kec. Tuminting, Kota Manado	Sulut	BNNP SULAWESI UTARA	2.00	Waspada	1.85	Waspada	Belum Pulih
77	Desa Otam, Kec. Passi Barat, Kab. Bolaang Mongondow		BNNK BOLAANG MONGONDOW	1.87	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
78	Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Sulteng	BNNP Sulteng	1.00	Bahaya	1.70	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
79	Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu		BNNK Palu	1.00	Bahaya	1.89	Waspada	Pulih
80	Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar	Sulsel	BNNP Sulawesi Selatan	1.00	Bahaya	1.99	Waspada	Pulih
81	Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Salotellue		BNNK Palopo	1.92	Waspada	2,11	Siaga	Pulih
82	Kecamatan Simbang, Desa Jenetaesa, Kab. Maros		Direktorat Dayatif	1,99	Waspada	2,14	Siaga	Pulih
83	Kelurahan Nambo, Kec. Abeli, Kota Kendari	Sultra	BNNP SULAWESI TENGGERA	2,05	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
84	Aula Kantor Kecamatan Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kab. Kolaka		BNNK KOLAKA	1,59	Bahaya	1,8	Waspada	Pulih
85	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju	Sulbar	BNNP Sulawesi Barat	2.05	Waspada	2,12	Siaga	Pulih
86	Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar		BNNK Polewali Mandar (Sulawesi Barat)	1.00	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
87	Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango	Gorontalo	BNNP GORONTALO	1	Bahaya	1,63	Waspada	Pulih
88	Aula Kantor Lurah Biawu Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo		BNN KOTA GORONTALO	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih
89	Desa hitu lama kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah	Maluku	BNNP Maluku	1.01	Bahaya			Belum Terukur

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
90	Desa Fatmite Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan BNNK Buru Selatan		BNNK Buru Selatan (Maluku)	1.60	Waspada	1,72	Waspada	belum Pulih
91	Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara	Malut	BNNP Maluku Utara	1.41	Bahaya	1.83	Waspada	Pulih
92	Kelurahan Gamtufkange Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan		BNNK Tidore Kepulauan	1.41	Bahaya	2,04	Waspada	Pulih
93	Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung	Bali	BNNP Bali	1.00	Bahaya	2.09	Waspada	Pulih
94	Kel. Semarapura Klod, Kec. Klungkung		BNNK Klungkung	1.61	Waspada	1.99	Waspada	Pulih
95	Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah	NTB	BNNP NTB	1.00	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
96	Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat		BNNK Sumbawa Barat	2.01	Waspada	1.88	Waspada	belum Pulih
97	Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang	NTT	BNNP NTT	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih
98	Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu		BNNK BELU	1.00	Bahaya	1.88	Waspada	Pulih
99	Kelurahan Argapura, Distrik jayapura selatan, Kab. Jayapura	Papua	BNNP PAPUA	2.01	Waspada	2.18	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/Belum Pulih
100	Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur Kab Jayapura		BNNK Jayapura	1.40	Bahaya	1.74	Waspada	Pulih
101	Kelurahan Padarni Distrik/kec Manokwari barat,kab.manokwari	Pabar	BNNP PAPUA BARAT	1.00	Bahaya	2.02	Waspada	Pulih